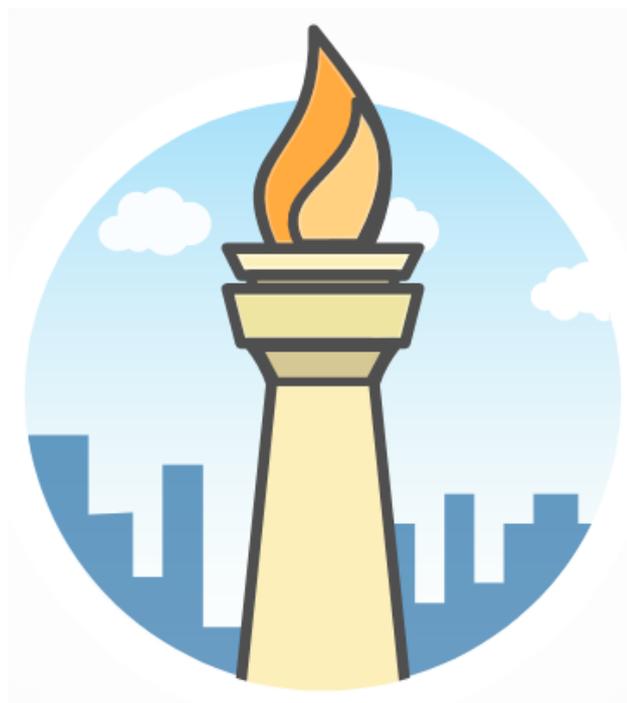




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; yang mengatur bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan laporan kinerja SKPD, Gubernur/ Bupati/ Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 yang disusun ini merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan segala kritik serta saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Dhany Sukma

NIP. 197403091993111001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	8
C. Susunan Organisasi .....	18
D. Peran Strategis Organisasi .....	21
E. Sistematika Penyajian .....	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
A. Perencanaan Strategis.....	24
B. Visi - Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta .....	24
C. Tujuan dan Sasaran .....	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
A. Akuntabilitas Keuangan.....	32
B. Akuntabilitas Kinerja.....	50
C. Analisis Kinerja dan Evaluasi .....	52
BAB IV PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Disdukcapil DKI Jakarta .....	27
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta .....	28
Tabel 2.3	Anggaran per Program Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta .....	29
Tabel 2.4	Anggaran per Indikator Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2020 .....	29
Tabel 2.5	Anggaran per Indikator Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2020 (Refocusing) .....	30
Tabel 2.6	Perbandingan Anggaran sebelum dan sesudah refocusing .....	30
Tabel 3.1	Tabel Perbandingan Anggaran Belanja 2018, 2019 dan 2020 .....	33
Tabel 3.2	Tabel Anggaran tahun 2020 Dinas Dukcapil DKI Jakarta .....	36
Tabel 3.3	Tabel Anggaran 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Pusat .....	38
Tabel 3.4	Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Utara .....	39
Tabel 3.5	Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Barat .....	40
Tabel 3.6	Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Selatan .....	42
Tabel 3.7	Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Timur .....	44
Tabel 3.8	Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Kep. 1000 .....	45
Tabel 3.9	Tabel Anggaran tahun 2020 UPTIK .....	46
Tabel 3.10	Tabel Anggaran tahun 2020 UPAK .....	48
Tabel 3.11	Penyerapan Anggaran Disdukcapil Tahun 2020 .....	49
Tabel 3.12	Capaian Sasaran Strategis .....	51
Tabel 3.13	Anggaran Sasaran Strategis .....	52
Tabel 3.14	Tabel Nilai Kepuasan Eksternal Disdukcapil DKI Jakarta .....	57
Tabel 3.15	Capaian Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil .....	60
Tabel 3.16	Kegiatan Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil .....	60
Tabel 3.17	Capaian Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil .....	62
Tabel 3.18	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk .....	62
Tabel 3.19	Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil .....	63

Tabel 3.20	Kegiatan Pendukung Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Dukcapil.....	64
Tabel 3.21	Capaian pemanfaatan data penduduk instansi/lembaga pengguna data .....	65
Tabel 3.22	Pemanfaatan Data Melalui Akses Data.....	66
Tabel 3.23	Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Pemanfaatan Data Penduduk.....	69
Tabel 3.24	Capaian Indeks kepuasan pelayanan kantor .....	69
Tabel 3.25	Kegiatan Pendukung Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor.....	70
Tabel 3.26	Capaian Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional.....	73
Tabel 3.27	Kegiatan Pendukung Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Penghargaan Si Dukun 3 in 1 .....	5
Gambar 1.2. Penghargaan Si Mas Gesit .....	6
Gambar 1.3. Penghargaan JAK 5 INDUKSI .....	8
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2020 .....	28
Gambar 3.1 Perhitungan Interval Nilai Kepuasan .....	54
Gambar 3.2 Jumlah Responden IKM.....	55
Gambar 3.3 Nilai IKM Layanan Disdukcapil di Tingkat Kelurahan.....	56
Gambar 3.4 Hasil Survey Pegawai Dukcapil Kecamatan DKI Jakarta.....	57
Gambar 3.5 Hasil Survey Pegawai Suku Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta .....	58
Gambar 3.6 Hasil Survey Pegawai Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.....	59

## IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Berdasarkan **Perjanjian Kinerja Tahun 2020** antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020, ditetapkan **4 (empat) sasaran strategis** yang pencapaiannya melalui **3 (tiga) program prioritas**.
  - Empat sasaran strategis terdiri dari :
    1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
    2. Meningkatnya kualitas pelayanan Dukcapil sesuai ketentuan
    3. Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
    4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
  - Tiga program prioritas terdiri dari :
    1. Program penataan administrasi kependudukan
    2. Program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
    3. Program pengelolaan kendaraan operasional urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Gambaran anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	2018			2019			2020		
	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	201.267.297.000	177.053.935.498	87,97	194.414.895.000	177.744.699.796	91,43	129.839.131.196	110.693.374.241	85,25
Belanja Langsung	86.156.328.906	69.579.987.667	80,76	79.882.135.195	66.008.922.348	82,63	135.927.042.452	130.577.197.542	96,06
<b>TOTAL</b>	<b>287.423.625.906</b>	<b>246.633.923.165</b>	<b>85,81</b>	<b>274.297.030.195</b>	<b>243.753.622.144</b>	<b>88,86</b>	<b>274.297.030.195</b>	<b>243.753.622.144</b>	<b>88,86</b>

3. Ikhtisar realisasi target kinerja dan capaian kinerja sasaran strategis serta penyerapan anggaran per-indikator kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Kinerja 2019			Kinerja 2020			Anggaran 2020		
			Target	Capaian	Capaian Indikator	Target	Capaian	Capaian Indikator	APBD-P	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	70,00%	84,29%	120,41%	86,00%	96,90%	112,67%	50.819.196.318	50.119.623.674	98,62%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	67,10%	78,87%	117,54%	75,70%	85,96%	113,55%	34.732.383.795	32.634.450.443	93,96%
		Persentase Pemanfaatan Data Penduduk Instansi/ Lembaga Pengguna Data	40,00%	47,50%	118,75%	60,00%	98,33%	163,89%	169.727.025	167.224.500	98,53%
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	3 Indeks	4 Indeks	133,30%	4 Indeks	4 Indeks	100,00%	49.574.729.351	47.197.450.690	95,20%
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	2 Indeks	3 indeks	150,00%	3 Indeks	3 Indeks	100,00%	631.005.963	458.448.235	72,65%
<b>TOTAL</b>								<b>135.927.042.452</b>	<b>130.577.197.542</b>	<b>96,06%</b>	

4. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan selama kurun waktu tahun 2020 adalah :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat mendapatkan penghargaan “Zona Integritas Wilayah Bebas Koprupsi” (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan Kemenpan RB bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Hari Anti-Korupsi Sedunia. Untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM ada lima aspek yang dinilai. Yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan predikat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada satker yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK.



- b. Terdapat 162 Faskes di seluruh wilayah DKI Jakarta yang telah terintegrasi dengan SIMPATIK Dukcapil
- SIMPATIK DUKCAPIL (sistem Manajemen Pelayanan Akta, KIA dan KK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) yang sebelumnya bernama Si Dukun 3 In 1 (Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan 3 Instansi Dalam 1 Loker Layanan) adalah Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Disdukcapil, Rumah Sakit, dan BPJS Kesehatan) dalam satu loket pelayanan. Maka untuk ibu yang melahirkan di RS yang telah terintegrasi dengan sistem SIMPATIK Jakarta ini sudah langsung bisa mendapatkan 6 Dokumen Kependudukan secara gratis, yaitu:
1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit
  2. Akta Kelahiran
  3. NIK Bayi
  4. Kartu Keluarga Terbaru
  5. Kartu Identitas Anak
  6. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta turut mendukung program Pemerintah dalam hal pembatasan social guna menekan penularan penyakit covid-19. Hal yang dilakukan adalah dengan meluncurkan layanan administrasi kependudukan melalui layanan whatsapp di tiap wilayah untuk meminimalisir pelayanan tatap muka langsung :

- Info Layanan Jakarta Utara : 087782112380
- Info Layanan Jakarta Selatan : 083893422745/ 08561919079
- Info Layanan Jakarta Pusat : 081293949937
- Info Layanan Jakarta Barat : 081283676688
- Info Layanan Jakarta Timur : 081388590204

Selain itu, Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi “Alpukat Betawi” yang memungkinkan warga untuk melakukan update dokumen adminduk tanpa perlu datang ke kantor pengurusan Dukcapil DKI Jakarta.

d. Berdasarkan data per - Desember 2020, **jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta** sebagai berikut :

NO	KOTA/KAB	JUMLAH PENDUDUK									SEX RATIO	LUAS WILAYAH (KM2)	RATIO KEPADATAN (jiwa/Km2)
		WNI			WNA			WNI + WNA					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	KEPULAUAN SERIBU	14.815	14.415	29.230	0	0	0	14.815	14.415	29.230	103	8,70	3.359,77
2	JAKARTA PUSAT	581.287	572.112	1.153.399	411	318	729	581.698	572.430	1.154.128	102	48,13	23.979,39
3	JAKARTA UTARA	930.030	913.507	1.843.537	509	416	925	930.539	913.923	1.844.462	102	146,66	12.576,45
4	JAKARTA BARAT	1.295.268	1.274.194	2.569.462	474	296	770	1.295.742	1.274.490	2.570.232	102	129,54	19.841,22
5	JAKARTA SELATAN	1.184.601	1.182.401	2.367.002	1.191	600	1.791	1.185.792	1.183.001	2.368.793	100	141,27	16.767,84
6	JAKARTA TIMUR	1.626.087	1.607.916	3.234.003	172	101	273	1.626.259	1.608.017	3.234.276	101	188,03	17.200,85
	PROV. DKI JAKARTA	5.632.088	5.564.545	11.196.633	2.757	1.731	4.488	5.634.845	5.566.276	11.201.121	101	662,33	16.911,69

Sebagai perbandingan, **jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 adalah 11.063.324 jiwa**, terdapat laju kenaikan 1,25%.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Dhany Sukma  
NIP 197403091993111001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban SKPD atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 300 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 301 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara serta peran strategisnya sebagai pusat dari berbagai aktifitas seperti pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain telah menjadikan DKI Jakarta berkembang sebagai kota megapolitan yang maju dan modern dengan tingkat pertumbuhan, pendapatan regional dan modernitas yang tertinggi di Indonesia. Namun demikian, sebaliknya, DKI Jakarta yang mempunyai citra sebagai kota yang bertabur sejuta gemerlap keindahan (*the city with million charms*) ini juga harus menanggung konsekuensi untuk menjadi wilayah yang paling sarat dengan beban kompleksitas permasalahan dan persoalan bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pangkal timbulnya permasalahan perkotaan lainnya adalah masalah kepadatan penduduk akibat jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta yang terus bertambah

dengan besaran yang jauh melebihi ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimiliki DKI Jakarta. Ketidakmampuan wilayah DKI Jakarta untuk terus-menerus menyerap dan menampung para pendatang pada akhirnya memunculkan persoalan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di wilayah DKI Jakarta.

DKI Jakarta sebagai ibukota Negara tentunya mengundang banyak pendatang untuk menetap dan mengadu nasib disini. DKI Jakarta memiliki bentang wilayah yang tidak besar bila merujuk pada Keputusan Gubernur Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas. Luas DKI Jakarta sekitar 662,33 kilometer persegi. Jumlah penduduknya hingga tahun 2020 mencapai 11.201.121 jiwa. Termasuk di dalamnya warga negara asing (WNA) sebanyak 4.488 jiwa.

Kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini telah mencapai 8.404,08 jiwa per kilometer persegi. Atau setara dengan 59 kali lipat bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa persegi hasil proyeksi penduduk tahun 2020 dibagi dengan luas daratan Indonesia. Wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di DKI Jakarta ada di Jakarta Pusat. Sebagai kota pusat pemerintahan, Jakarta Pusat hanya memiliki luas 48,13 km persegi atau 7,3 persen dari luas DKI Jakarta. Dengan luas itu, Jakarta Pusat menampung 1.154.128 penduduk. Termasuk di dalamnya 729 WNA. Sehingga kepadatan penduduknya mencapai 23.979 jiwa/km persegi. Bila kita bandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk di DKI Jakarta, maka terdapat 3 wilayah yang kepadatan penduduknya diatas rata-rata, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang serta pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan baik melalui pembinaan penduduk (Biduk) bekerjasama dengan daerah anggota Mitra Praja Utama (MPU) yakni Pemerintah

Provinsi diseluruh pulau Jawa ditambah pulau Bali, Lampung dan NTB maupun BODETABEKJUR.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang tertib administrasi kependudukan, juga dilakukan berbagai inovasi guna memudahkan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan terutama Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, adapun inovasi-inovasi tersebut diantaranya :

1. Layanan Mobile Service

Bentuk Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan mobil keliling untuk pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang di gelar secara berkala pada tempat atau wilayah yang mudah terjangkau masyarakat. Pelayanannya meliputi :

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) : Layanan Perpanjangan KTP
- b. Pelayanan Pelaporan Kelahiran.

2. **SIMPATIK DUKCAPIL** (Sistem Manajemen Pelayanan Akta, KIA dan KK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) yang **sebelumnya** bernama Si Dukun 3 In 1 (Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan 3 Instansi Dalam 1 Loker Layanan), *yaitu pelayanan yang dilaksanakan di RSUD, RSU Swasta, Puskesmas dan Klinik Bersalin yang jumlahnya sampai dengan Tahun 2020 sekitar 162 Instansi/ lembaga untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi bayi yang baru lahir di RSUD/ RSU mendapatkan NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA dan akses BPJS Kesehatan*, inovasi ini masuk kedalam **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017**.



Gambar 1.1. Penghargaan Si Dukun 3 in 1

3. **Dokter Perkasa** (Dokumen Terintegrasi Penuh Rasa Kasih Sayang), adalah inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan Dinas Sosial yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dokumen kependudukan warga masyarakat yang termarginalkan khususnya Warga Binaan Sosial (WBS) yang berada di Panti Sosial dengan memberikan pelayanan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk kebutuhan semua pelayanan publik diantaranya Fasilitas layanan kesehatan BPJS dan layanan pendidikan KJP.
4. **Si MAS GESIT** (Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Berbasis Informasi Elektronik) merupakan pelayanan yang berbasis elektronik pada Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Cipedak, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, pada Tahun 2019 inovasi ini mendapatkan Penghargaan sebagai **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019**.



Gambar 1.2. Penghargaan Si Mas Gesit

5. **Alpukat Betawi** (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat) adalah *mobile apps* yang bisa diunduh di ponsel android melalui Google Playstore, melalui aplikasi ini penduduk dapat mengajukan permohonan layanan, penjadwalan pelayanan, dan memonitor pelayanan yang diajukannya, pelayanan yang bisa diproses pada aplikasi ini diantaranya pencetakan KTP-el (rusak atau hilang), pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, perubahan biodata, permohonan pindah dan legalisir. Pada saat ini aplikasi ini masih dalam tahap uji coba sehingga masih dilakukan beberapa pengembangan.
6. **Paket Layanan Kependudukan**, adalah Paket layanan pengurusan dokumen kependudukan kependudukan yang diberikan apabila dalam berdampak pada perubahan dokumen lainnya sebagai contoh :
  - a. Pelayanan Akta Kelahiran bagi anak baru lahir maka akan berdampak pada Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga baru, Penerbitan KIA untuk anak usia 0-17 Tahun, maka dalam pelayanan Akta Kelahiran tersebut akan diberikan Akta Kelahiran, KK, KIA

- b. Pelayanan Akta Kematian maka akan berdampak pada Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga dan Perubahan Status untuk suami/ istri yang ditinggalkan, maka dalam pelayanan Akta Kematian tersebut akan diberikan Akta Kematian, KK, KTP/ Perubahan status.
7. **Layanan Kependudukan 1 Jam**, adalah sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana urusan Administrasi Kependudukan maka semua pelayanan dokumen administrasi kependudukan di kelurahan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam sejak dokumen dinyatakan lengkap dan apabila dokumen tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut petugas pelayanan di wilayah tersebut wajib mengantarkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke tempat tinggal pemohon.
  8. **SILAPORLAGI** (Sistem Pelaporan Orang Asing dan Pelaporan Luar Negeri), adalah pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, berbentuk website dimana pemohon dapat melakukan permohonan secara online yang dapat diakses di website <http://silaporlagi-dukcapil.jakarta.go.id/>.
  9. **Dukcapil Menyapa Warga**, merupakan upaya Dinas Dukcapil untuk memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat melalui media sosial (Youtube), kegiatan ini merupakan upaya memberikan edukasi masyarakat tentang pelayanan Dukcapil terutama pada saat Pandemi Covid-19 sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan online Dukcapil.
  10. **Jakarta Mendata Warga**, merupakan aplikasi layanan yang memberikan akses kepada perangkat kelurahan, khususnya Ketua RT/RW untuk mendata warga di lingkungannya, pada tahap awal aplikasi ini digunakan untuk mendata warga non permanen di lingkungan RT/RW, warga non permanen yang terdata diarahkan untuk membuat Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) di Kecamatan, Jakarta Mendata Warga dapat diakses di alamat <https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id>.
  11. **JAK 5 INDUKSI**, merupakan Inovasi Pelayanan Publik kolaborasi antara Satpel Dukcapil Kelurahan Kalianyar dengan Puskesmas

Kelurahan Kalianyar, yaitu Layanan Terintegrasi yang memudahkan pengurusan dokumen administrasi kependudukan anak yang terintegrasi serta mengedukasi kepada ibu hamil sehingga meminimalisir angka kematian ibu dan bayi dalam kandungan melalui SMS /whatsapps / Aplikasi Jak 5 Induksi yang bisa di download di Google Playstore



Gambar 1.3. Penghargaan JAK 5 INDUKSI

#### B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 85 tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar telmis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

5. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data kependudukan;
6. Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan;
7. Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
8. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan;
9. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;
10. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum;
11. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
12. Penyusunan profil kependudukan;
13. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil;
14. Pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
16. Perawatan prasarana dan sarana kelja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
18. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
19. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Stoll;
21. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
22. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) UPT yang bekerja

sesuai dengan lingkup tugasnya serta 6 (enam) Kepala Suku Dinas Kota / Kabupaten Administrasi.

Tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang serta UPT adalah:

Tugas Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil oleh unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis administrasi kependudukan;
7. Pelayanan administrasi kepegawaian, pembinaan kinerja, disiplin dan mental spiritual pegawai;
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Pengelolaan kearsipan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Tugas Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, petugas khusus dan penduduk transmigrasi;
4. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan petugas khusus dan penduduk transmigrasi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk pada UKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pelaksanaan pengembangan dan inovasi pelayanan pendaftaran penduduk.
7. Pelaksanaan pengelolaan dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan
8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendaftaran Penduduk.

Tugas Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,

perubahan status anak, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan akta pencatatan sipil, duplikat akta pencatatan sipil, pengelolaan dokumen pencatatan sipil dan monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

4. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan akta pencatatan sipil, duplikat akta pencatatan sipil, pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil pada UKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Pelaksanaan pengembangan dan inovasi pelayanan pencatatan sipil;
7. Pelaksanaan pengelolaan dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
8. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Pencatatan Sipil.

Tugas Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan;
4. Pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi administrasi kependudukan;
5. Pengoordinasian pendataan, pengolahan dan penyajian data dan informasi hasil administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan monitoring, bimbingan, supervisi dan konsultasi teknis pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan;
7. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pengolahan dan pendayagunaan data dan informasi administrasi kependudukan;

8. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan; dan
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Data dan Informasi.

Tugas Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia administrasi kependudukan;
5. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penerbitan dokumen kependudukan;
7. Penanganan kasus-kasus administrasi kependudukan dalam rangka peningkatan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan
8. Pengawasan, penelusuran, pengusutan, penyelesaian dan pelaksanaan koordinasi penanganan kasus sengketa dan pidana administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pembinaan, pengawasan, pengusutan dan pengendalian administrasi kependudukan;
10. Pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan; k. pembinaan aparat teknis pengawasan dan penindakan administrasi kependudukan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan.

Tugas Suku Dinas Kota Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta (Suku Dinas Jakarta Pusat, Suku Dinas Jakarta Timur, Suku Dinas Jakarta Barat, Suku Dinas Jakarta Utara, Suku Dinas Jakarta Selatan) :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan pada lingkup wilayah Kota Administrasi;
4. Pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan pada lingkup Kota Administrasi;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk pada lingkup Kota Administrasi;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk pelayanan yang bersifat khusus, peristiwa penting dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
7. Pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan pada lingkup Kota Administrasi;
8. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan supervisi terhadap Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
10. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;
11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;
12. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
14. Pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota; dan
15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

Tugas Suku Dinas Kabupaten Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta (Suku Dinas Kabupaten Kepulauan Seribu) :

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;
4. Pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk pada lingkup Kabupaten Administrasi;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk pelayanan yang bersifat khusus, peristiwa penting dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
7. Pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
8. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan supervisi terhadap Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
10. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;
11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten;
12. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kabupaten;
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;
14. Pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten; dan
15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.

Tugas Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Dukcapil DKI Jakarta :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan teknologi informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pengelolaan Hak Akses pengguna teknologi informasi kependudukan;
5. Pelaksanaan teknis pengelolaan keamanan sistem, service desk, konfigurasi sistem, jaringan dan perangkat;
6. Pengendalian operasional teknologi informasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan pada Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, RSUD, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Kantor Imigrasi, serta unit terkait pemanfaat data kependudukan;
7. Pelaksanaan teknis pengembangan aplikasi, software dan hardware pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pemeliharaan dan perawatan aplikasi, software dan hardware termasuk database pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di loket-loket pelayanan;
9. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi teknis dan operasional aplikasi, software dan hardware kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UPTIK;
11. Pengelolaan prasarana dan sarana UPTIK;
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTIK;
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTIK;
14. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja teknologi informasi kependudukan; dan
15. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPTIK.

Tugas Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil DKI Jakarta :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil;
4. Pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil orang asing dan dokumen register akta catatan sipil yang meliputi surat keterangan tempat tinggal, perubahan status kependudukan dan orang asing pemegang izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap, perubahan kewarganegaraan, perubahan status kependudukan anak, pelaporan pencatatan sipil luar negeri, pencatatan sipil orang asing pemegang izin tinggal terbatas ke izin tinggal tetap, duplikat akta daerah dan luar daerah, catatan pinggir, perubahan akta catatan sipil, pembetulan akta catatan sipil, salinan akta catatan sipil, pembatalan akta catatan sipil, keabsahan akta, penerbitan Berita Acara hasil pengecekan register akta pencatatan sipil, mutasi data dan legalisasi dokumen kependudukan;
5. Pelayanan informasi dan pengoordinasian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil luar daerah;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan;
7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan;
8. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan;
9. Pengelolaan kearsipan Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan;
10. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan;

11. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
12. Penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum
  - b. Subbagian Kepegawaian
  - c. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
  - d. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk
  - c. Seksi Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - c. Seksi Pengelolaan Dokumen Akta Pencatatan Sipil
5. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Data Vital Kependudukan
  - b. Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data
  - c. Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi

6. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan
  - b. Seksi Pengawasan dan Penindakan
  - c. Seksi Pengendalian Administrasi Kependudukan
  
7. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, susunan organisasi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Suku Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - d. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil
  - e. Seksi Data, Informasi dan Pengawasan
  
8. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, susunan organisasi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Suku Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - d. Seksi Data, Informasi dan Pengawasan
9. Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
10. Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) susunan organisasi UPTIK terdiri dari:

- b. Kepala Unit
- c. Sub Bagian Tata Usaha
- d. Satuan Pelaksana Aplikasi, Software dan Database
- e. Satuan Pelaksana Hardware dan Jaringan

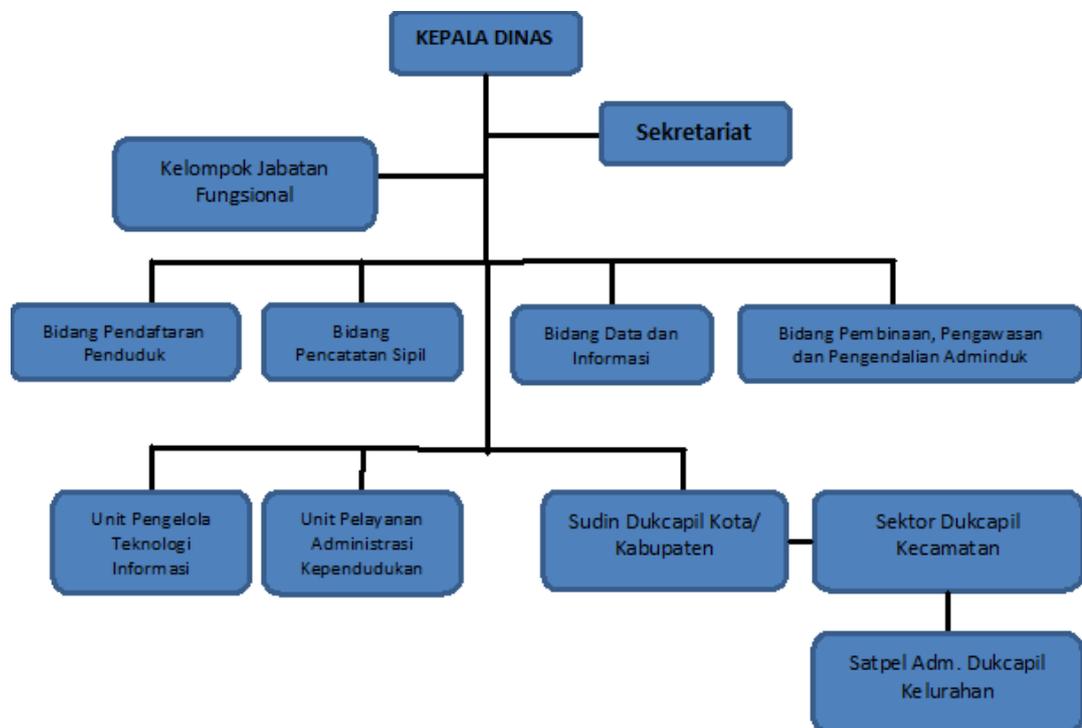
- f. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi Kependudukan Wilayah
- g. Sub kelompok Jabatan Fungsional

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (UPAK), susunan organisasi UPAK, terdiri dari:

- a. Kepala Unit
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Satuan Pelaksana Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Satuan Pelaksana Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Satuan Pelaksana Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan
- f. Sub kelompok Jabatan Fungsional

Untuk selengkapnya, bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Dinas



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab secara teknis

administratif kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan secara operasional bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati yang bersangkutan. Suku Dinas mempunyai Tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (*Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 Pasal 33 ayat (1)*).

*Kelompok Jabatan Fungsional* bertugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Meskipun secara struktural Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019 menempatkan Kelompok Jabatan Fungsional dalam struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, namun sampai saat ini belum ada Pegawai dengan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### D. Peran Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2019, khususnya yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengendalian mobilitas penduduk dan penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan aspek strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang pendaftaran penduduk, antara lain berupa penerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS)
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan
- e. Surat-surat keterangan kependudukan lainnya

Dalam rangka kepastian hukum terkait dengan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan di bidang pencatatan sipil dengan menerbitkan Akta-akta Catatan Sipil bagi mereka yang mengalami peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai, pengakuan anak, pengangkatan dan pengesahan anak, dll.) di DKI Jakarta.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

#### E. Sistematika Penyajian

Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 *tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2003 *tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 *tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 *tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 *tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik*.

Secara garis besar, LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

Sistematika laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah laporan. Secara garis besar, semua laporan memiliki 3 bagian utama, yang terdiri atas : bagian awal/pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Diharapkan dengan penyusunan laporan LAKIP secara sistematis menurut sistematika laporan, maka penyampaian informasi mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta akan tersampaikan dengan lebih jelas.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022.

#### **B. Visi - Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

##### **1. Visi**

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 - 2022 pada waktu kampanye menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta 2017 - 2022. Melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan bottom up dan top down, maka visi Provinsi DKI Jakarta 2017 - 2022 adalah:

“Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

##### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun misi RPJMD DKI Jakarta adalah:

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.

- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

**”Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”**

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Gubernur DKI Jakarta, mengingat sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah Penduduk DKI Jakarta yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

### C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2017 - 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

#### Tujuan:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan Memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk;

#### Sasaran :

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan” adalah: **Meningkatnya persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.**
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan” yakni: **Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.” yakni: **Meningkatnya Instansi/ Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.**

#### Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan RPJMD.

Berikut pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Disdukcapil DKI Jakarta

Misi: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas (Misi RPJMD)				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memberikan pemenuhan hak atas layanan Administrasi Penduduk	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan peran fasilitasi dalam peningkatan cakupan data dan dokumen kependudukan
		Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan, sosialisasi kepada aparatur maupun masyarakat</li> <li>- Membangun sarana layanan yang lebih efisien dan efektif</li> <li>- Meningkatkan kompetensi aparatur, perangkat dan manajemen pelayanan data kependudukan dan sosialisasi kepada perangkat daerah lainnya</li> <li>- Penyusunan berbagai kebijakan layanan efisien dan efektif</li> </ul>
		Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government instansi terkait	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan

Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 31 Januari 2020, ditetapkan kinerja seluruh SKPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Penetapan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	75,70 Persentase
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Dukcapil sesuai ketentuan	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	86,00 Indeks
3	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memanfaatkan data penduduk	60,00 Persentase
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00 Persentase

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 117.077.719.367	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rp. 62.902.273.038	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rp. 2.308.927.867	APBD Provinsi DKI Jakarta

<p>Gubernur Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Anies Rasyid Baswedan, Ph.d</p>	<p>Jakarta, 31 Januari 2020 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta</p>  <p>Dhany Sukma NIP. 197403091993111001</p>
---	--

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2020

Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui melalui 4 (empat) indikator kinerja dan telah ditetapkan 3 (tiga) program *pendukung tercapainya sasaran strategis* beserta rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	75,70 (%)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Dukcapil sesuai ketentuan	Indeks kepuasan layanan Dukcapil	86 (Indeks)
3	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Presentase unit kerja perangkat daerah yang memanfaatkan data penduduk	60,00 (%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (%)

Tabel 2.3 Anggaran per Program Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

No	Program	Anggaran APBD 2020	Anggaran APBD P 2020	Keterangan
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.117.077.719.367	Rp.85.721.307.138	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.62.902.273.038	Rp.49.574.729.351	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.2.308.927.867	Rp.631.005.963	APBD Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.4 Anggaran per Indikator Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2020

Jenis Belanja	Anggaran	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Adminkapil	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Adminkapil
Dinas Dukcapil	19.968.934.040	13.317.659.832	6.450.511.182	200.763.026
Sudin Dukcapil Jakpus	20.392.513.395	18.014.102.251	1.997.849.708	380.561.436
Sudin Dukcapil Jakut	21.606.045.525	18.217.092.366	3.128.558.693	260.394.466
Sudin Dukcapil Jakbar	27.221.406.102	22.664.689.836	4.027.813.940	528.902.326
Sudin Dukcapil Jaksel	31.272.562.159	12.924.151.176	18.101.713.535	246.697.448
Sudin Dukcapil Jaktim	28.851.002.416	202.099.060	28.025.481.970	623.421.386
Sudin Dukcapil Kep.Seribu	1.323.288.139	919.824.987	403.463.152	-
UPTIK	30.610.782.629	30.226.240.354	330.929.426	53.612.849
UPAK	1.042.385.867	591.859.505	435.951.432	14.574.930
<b>TOTAL PENGABUNGAN</b>	<b>182.288.920.272</b>	<b>117.077.719.367</b>	<b>62.902.273.038</b>	<b>2.308.927.867</b>

Pada tahun 2020 terjadi wabah penyakit covid-19 (corona virus disease 2019) yang awal mula diketahui sejak Desember tahun 2019 dan mulai menjadi pandemi yang merebak ke penjuru dunia sejak bulan Maret 2020. Pandemi covid-19 berpengaruh juga terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia dan Jakarta pada

khususnya. Perekonomian Jakarta terdampak cukup hebat sebagai dampak dari pembatasan aktivitas social di masyarakat, seperti pembatasan jam kunjungan di pusat perbelanjaan, pembatalan acara, penutupan tempat rekreasi, pembatasan jumlah pengunjung di tempat makan, dan lain sebagainya. Penurunan perekonomian Jakarta berdampak juga kepada APBD DKI Jakarta tahun 2020, sehingga banyak kegiatan yang mengalami *refocusing*/ efisiensi dan bahkan ada kegiatan yang dihapuskan.

Kegiatan *refocusing* tahun 2020. Adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran per Indikator Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2020 (Refocusing)

Jenis Belanja	Anggaran	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Admindukcapil	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Admindukcapil
Dinas Dukcapil	13.445.032.185	8.389.791.012	5.005.911.673	49.329.500
Sudin Dukcapil Jakpus	17.351.040.757	16.158.128.737	1.121.273.586	71.638.434
Sudin Dukcapil Jakut	18.465.673.432	16.349.985.323	2.051.848.509	63.839.600
Sudin Dukcapil Jakbar	23.511.371.236	20.768.675.826	2.613.241.360	129.454.050
Sudin Dukcapil Jaksel	24.639.773.571	12.595.705.611	11.970.582.060	73.485.900
Sudin Dukcapil Jaktim	26.463.045.144	12.675.000	26.264.817.144	185.553.000
Sudin Dukcapil Kep.Seribu	1.231.865.167	883.076.994	348.788.173	-
UPTIK	10.148.465.030	10.080.600.861	14.251.320	53.612.849
UPAK	670.775.930	482.6.67.774	184.015.526	4.092.630
<b>TOTAL PENGGABUNGAN</b>	<b>135.927.042.452</b>	<b>85.721.307.138</b>	<b>49.574.729.351</b>	<b>631.005.963</b>

Perbandingan alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2020 sebelum dan sesudah *refocusing* :

Tabel 2.6 Perbandingan Anggaran sebelum dan sesudah refocusing

Jenis Belanja	Anggaran tahun 2020	Anggaran tahun 2020 (Refocusing)	Selisih
Dinas Dukcapil	19.968.934.040	13.445.032.185	6.523.901.855
Sudin Dukcapil Jakpus	20.392.513.395	17.351.040.757	3.041.472.638
Sudin Dukcapil Jakut	21.606.045.525	18.465.673.432	3.140.372.093

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran tahun 2020</b>	<b>Anggaran tahun 2020 (Refocusing)</b>	<b>Selisih</b>
Sudin Dukcapil Jakbar	27.221.406.102	23.511.371.236	3.710.034.866
Sudin Dukcapil Jaksel	31.272.562.159	24.639.773.571	6.632.788.588
Sudin Dukcapil Jaktim	28.851.002.416	26.463.045.144	2.387.957.272
Sudin Dukcapil Kep.Seribu	1.323.288.139	1.231.865.167	91.422.972
UPTIK	30.610.782.629	10.148.465.030	20.462.317.599
UPAK	1.042.385.867	670.775.930	371.609.937
<b>TOTAL PENGGABUNGAN</b>	<b>182.288.920.272</b>	<b>135.927.042.452</b>	<b>46.361.877.820</b>

Nominal selisih pada tabel di atas merupakan nominal yang direfocusing atau mengalami pengurangan anggaran. Refocusing terdiri dari komponen kegiatan yang dikurangi, kegiatan selanjutnya tidak jadi dilaksanakan maupun kegiatan yang dihapuskan. Sehingga total efisiensi tahun anggaran 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas, UPT dan Suku Dinas) mencapai Rp.46.361.877.820,-.

Hal tersebut guna mendukung program Pemprov DKI Jakarta untuk mengutamakan anggaran tahun 2020 demi penanggulangan pandemi, sehingga mengalihkan belanja modal dan kegiatan lain yang dianggap tidak urgent. Selain itu efisiensi juga dilakukan sebagai dampak dari APBD DKI Jakarta yang terkoreksi karena pandemi covid-19.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua pada tanggal 31 Januari, terdapat *sasaran strategis* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2020 adalah :

	Sasaran Strategis
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Dukcapil sesuai ketentuan
3	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
4	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Adapun *indikator kinerja* untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah :

	Indikator Kinerja
1	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2	Indeks kepuasan layanan Dukcapil
3	Presentase unit kerja perangkat daerah yang memanfaatkan data penduduk
4	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator ini juga sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### A. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2020 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022. Berikut adalah tabel perbandingan anggaran belanja, penyerapan dan persentase tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

## 1. Perbandingan Anggaran Belanja Tahun 2018, 2019 dan 2020

Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Anggaran Belanja 2018, 2019 dan 2020

No	SKPD/UKPD	APBD-P 2018	APBD-P 2019	APBD-P 2020	Selisih APBD-P2020 terhadap APBD-P 2019
1	Dinas	271.181.218.711	274.297.030.195	143.284.163.381	(131.012.866.814)
	BL	69.913.921.711	79.882.135.195	13.445.032.185	(66.437.103.010)
	BTL	201.267.297.000	194.414.895.000	129.839.131.196	(64.575.763.804)
2	Sudin Jakpus	7.192.014.869	11.847.131.890	17.351.040.757	5.503.908.867
3	Sudin Jakut	8.448.891.130	11.109.600.819	18.465.673.432	7.356.072.613
4	Sudin Jakbar	10.055.396.845	15.646.997.567	23.511.371.236	7.864.373.669
5	Sudin Jaksel	11.368.199.197	17.143.891.635	24.639.773.571	7.495.881.936
6	Sudin Jaktim	11.420.006.281	15.871.025.010	26.463.045.144	10.592.020.134
7	Sudin Kep. 1000	1.136.757.958	1.162.562.000	1.231.865.167	69.303.167
8	UPTIK	12.713.773.688	39.147.370.201	10.148.465.030	(28.998.905.171)
9	UPAK	3.528.633.507	6.433.745.883	670.775.930	(5.762.969.953)
	Total BL	135.777.595.186	198.244.460.200	129.839.131.196	(68.405.329.004)
	Total BTL	201.267.297.000	194.414.895.000	135.927.042.452	(58.487.852.548)
	Total BL + BTL	337.044.892.186	392.659.355.200	265.766.173.648	(126.893.181.552)

Pada tabel tersebut di atas dibahas mengenai selisih antara APBD-P tahun 2020 dengan APBD-P tahun 2019 dengan penjelasan secara singkat sebagai berikut :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta :

1) Belanja Tidak Langsung (BTL) berkurang sebesar Rp.66.437.103.010,-

Selisih tersebut disebabkan adanya Penyesuaian Tunjangan Kinerja pegawai, dimana sejak bulan Mei 2020 Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta hanya menerima 50% tunjangan kinerja dari yang biasa diterima setiap bulannya. Sementara pada tahun anggaran 2019, tunjangan kinerja PNS yang diberikan masih 100%.

2) Belanja Langsung (BL) berkurang sebesar Rp.64.575.763.804,-

Selisih tersebut disebabkan banyak kegiatan yang dihentikan dan dihapuskan pada tahun anggaran 2020, sehingga apabila dibandingkan dengan besaran anggaran tahun 2019 terjadi selisih gap yang cukup besar.

- b. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
Gap selisih anggaran tahun 2019 dan 2020 Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berbeda dengan Dinas karena terjadi selisih gap surplus , dengan rincian sebagai berikut :

1) Sudin Dukcapil Jakarta Pusat

Terjadi surplus anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.5.503.908.867,-. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi karena terjadi pergeseran belanja tonner yang semula terpusat dilakukan di Dinas, saat ini dilakukan di masing-masing Suku Dinas. Besar anggaran pengadaan tonner di Sudin Jakarta Pusat adalah sebesar Rp.7.174.090.869,- dengan realisasi sebesar Rp.5.665.521.000,- (78,97%).

2) Sudin Dukcapil Jakarta Utara

Terjadi surplus anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.7.356.072.613,-. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi karena terjadi pergeseran belanja tonner yang semula terpusat dilakukan di Dinas, saat ini dilakukan di masing-masing Suku Dinas. Besar anggaran pengadaan tonner di Sudin Jakarta Utara adalah sebesar Rp.8.362.470.448,- dengan realisasi sebesar Rp.8.272.548.020,- (98,92%).

3) Sudin Dukcapil Jakarta Barat

Terjadi surplus anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.7.864.373.669,-. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi karena terjadi pergeseran belanja tonner yang semula terpusat dilakukan di Dinas, saat ini dilakukan di masing-masing Suku Dinas. Besar anggaran pengadaan tonner di Sudin Jakarta Barat adalah sebesar Rp.9.840.843.354,- dengan realisasi sebesar Rp.9.840.843.354,- (100,00%).

4) Sudin Dukcapil Jakarta Selatan

Terjadi surplus anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.7.495.881.936,-. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi karena terjadi pergeseran belanja tonner yang semula terpusat dilakukan di Dinas, saat ini dilakukan di masing-masing Suku Dinas. Besar anggaran pengadaan tonner di Sudin Jakarta Selatan adalah sebesar Rp.9.238.092.560,- dengan realisasi sebesar Rp.9.238.092.560,- (100,00%).

5) Sudin Dukcapil Jakarta Timur

Terjadi surplus anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.10.592.020.134,-. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi karena terjadi pergeseran belanja tonner yang semula terpusat dilakukan di Dinas, saat ini dilakukan di masing-masing Suku Dinas. Besar anggaran pengadaan tonner di Sudin Jakarta Timur adalah sebesar Rp.11.198.627.307,- dengan realisasi sebesar Rp.9.875.301.235,- (88,18%).

6) Sudin Dukcapil Jakarta Kep. 1000

Terjadi surplus anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.69.303.167,-. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi karena terjadi pergeseran belanja tonner yang semula terpusat dilakukan di Dinas, saat ini dilakukan di masing-masing Suku Dinas. Besar anggaran pengadaan tonner di Sudin Jakarta Kep 1000 adalah sebesar Rp.199.150.460,- dengan realisasi sebesar Rp.140.000.000,- (70,30%).

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dukcapil DKI Jakarta :

1) Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK)

Terjadi defisit gap anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.28.998.905.171,- karena kebijakan Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020 untuk meminimalisir kegiatan belanja modal. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi defisit gap anggaran UPTIK di tahun 2020 karena terjadi penghapusan kegiatan

“Pengadaan Perangkat Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan” yang sebelumnya ada di tahun anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.961.967.988,-.

## 2) Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (UPAK)

Terjadi defisit gap anggaran di tahun 2020 dibandingkan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.5.762.969.953,-. Hal tersebut karena jumlah kegiatan milik UPAK yang berkurang di tahun 2020 yaitu sebanyak 10 kegiatan, sedangkan sebelumnya adalah 21 (dua puluh satu) kegiatan di tahun 2021. Kegiatan yang paling signifikan mempengaruhi defisit gap anggaran UPAK di tahun 2020 karena terjadi pengalihan kegiatan “Perekaman Register Akta Berbasis T.I” yang sebelumnya ada di tahun anggaran 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.015.708.397,-, dan dialihkan ke Dinas pada tahun 2020. Kemudian ada kegiatan “Pengadaan Peralatan Kantor” dengan nominal anggaran di tahun 2019 sebesar Rp.2.671.711.460,- menjadi sebesar Rp.64.951.260,- di tahun 2020.

## 2. Perbandingan Anggaran Belanja tahun 2020 (sebelum dan sesudah refocusing)

Tahun 2020 terdapat kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga terdapat kegiatan yang mengalami refocusing sebagai dampak dari APBD DKI Jakarta yang terkoreksi karena pandemi covid-19. Hampir seluruh kegiatan di tahun 2020 mengalami pengurangan anggaran dan bahkan penghapusan kegiatan.

### a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

Tabel 3.2 Tabel Anggaran tahun 2020 Dinas Dukcapil DKI Jakarta

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Penanganan Kasus Administrasi Kependudukan dan Penelusuran Permasalahan Administrasi Kependudukan	46.800.000	4.875.000	-41.925.000
2	Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	102.327.330	101.027.330	-1.300.000
3	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	81.955.700	0	-81.955.700

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
4	Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)	4.805.648.400	2.233.000.000	-2.572.648.400
5	Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.017.789.519	3.613.321.526	-404.467.993
6	Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk	174.082.579	132.110.544	-41.972.035
7	Peningkatan dan Sinkronisasi Layanan Pendaftaran Penduduk	42.276.580	0	-42.276.580
8	Penataan dan Sinkronisasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Terintegrasi	23.263.270	0	-23.263.270
9	Penataan dan Sinkronisasi Pencatatan Perkawinan di KUA	593.991.380	0	-593.991.380
10	Pencatatan Perkawinan Masal	35.921.090	0	-35.921.090
11	Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing	56.255.450	6.580.000	-49.675.450
12	Pemutakhiran Data Keluarga	50.223.900	0	-50.223.900
13	Penyusunan/Penyajian Data Hasil Registrasi dan Profil Kependudukan	89.831.425	77.806.425	-12.025.000
14	Peningkatan Pemahaman Pemanfaatan Data	118.869.500	86.670.600	-32.198.900
15	Perekaman Register Akta Berbasis T.I.	2.421.982.176	1.529.004.156	-892.978.020
16	Pembinaan Pengelolaan Dokumen Adminduk	49.908.790	0	-49.908.790
17	Penataan Arsip Register Akta Catatan Sipil	606.532.743	605.395.431	-1.137.312
18	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.370.824.116	1.100.862.100	-269.962.016
19	Penyediaan makanan dan minuman	385.106.900	62.727.900	-322.379.000
20	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.894.050	3.675.000	-11.219.050
21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.687.000	3.462.000	-5.225.000
22	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	1.362.083.916	1.362.083.916	0
23	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	960.968.308	960.968.308	0
24	Penyediaan alat tulis kantor	104.725.060	63.261.000	-41.464.060
25	Penyediaan sewa mesin fotokopi	112.384.800	112.384.800	0
26	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	631.256.606	543.079.132	-88.177.474
27	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	120.806.320	120.806.320	0
28	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.334.520	0	-1.334.520
29	Pemeliharaan Lift Kantor	249.000.000	249.000.000	0
30	Pemeliharaan Taman	12.756.997	0	-12.756.997
31	Pengadaan peralatan kantor	132.406.076	0	-132.406.076
32	Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	381.556.997	357.601.197	-23.955.800
33	Pengadaan Cetakan Umum	114.831.200	0	-114.831.200
34	Pengolahan Limbah dan Instalasi	66.000.000	66.000.000	0
35	Pengadaan Fumigasi dan Rodent Control	300.136.276	0	-300.136.276
36	Pengadaan Mebeulair	80.602.040	0	-80.602.040
37	Pembinaan Mental Spiritual Pegawai	40.150.000	0	-40.150.000
38	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	9.329.500	9.329.500	0
39	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	111.168.000	40.000.000	-71.168.000
40	Pemeliharaan KDOL Roda 4 dan Roda 2	80.265.526	0	-80.265.526
	<b>Total</b>	<b>19.968.934.040</b>	<b>13.445.032.185</b>	<b>-6.523.901.855</b>

Pada Dinas Dukcapil DKI Jakarta, dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua kegiatan mengalami Refocusing, dan bahkan ada kegiatan yang dihapuskan. Total nilai anggaran yang mengalami refocusing pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.6.523.901.855,- dengan rincian :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 7 (tujuh) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.2.880.572.844,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran : ada 18 (delapan belas) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.4.788.754.710,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 15 (lima belas) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.1.640.023.345,-.

## b. Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat

Tabel 3.3 Tabel Anggaran 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Pusat

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Mobile	90.025.000	16.575.000	-73.450.000
2	Bina Kependudukan (Biduk)	28.600.000	0	-28.600.000
3	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan	8.968.902.460	8.967.462.868	-1.439.592
4	Penyediaan Formulir Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.731.010	0	-127.731.010
5	Pengelolaan dan Perawatan Register Akta Catatan Sipil	91.605.800	0	-91.605.800
6	Penyajian Profil Perkembangan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat	32.300.000	0	-32.300.000
7	Penyediaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan	8.674.937.981	7.174.090.869	-1.500.847.112
8	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	48.137.650	20.256.720	-27.880.930
9	Penyediaan alat tulis kantor	155.181.092	129.374.300	-25.806.792
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	194.386.060	0	-194.386.060
11	Penyediaan sewa mesin fotokopi	337.154.400	233.798.400	-103.356.000
12	Penyediaan makanan dan minuman	93.643.308	22.328.308	-71.315.000
13	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.634.800	3.555.600	-79.200
14	Penyediaan jasa administrasi surat-menyerat / caraka dan sopir	712.073.910	711.960.258	-113.652
15	Pengadaan Sarana Kerja	453.638.488	0	-453.638.488
16	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	20.896.500	20.896.500	0
17	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	115.500.000	50.741.934	-64.758.066
18	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang KDO/KDO Khusus	244.164.936	0	-244.164.936
	<b>Total</b>	<b>20.392.513.395</b>	<b>17.351.040.757</b>	<b>-3.041.472.638</b>

Sudin Dukcapil Jakarta Pusat mengalami jumlah refocusing anggaran di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.3.041.472.638,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing/pengurangan anggaran pada kegiatan dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing/ efisiensi di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 1 (satu) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.20.896.500,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran ada 10 (sepuluh) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran -Rp.1.869.046.344,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 7 (tujuh) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.1.172.426.294,-.

### c. Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utara

Tabel 3.4 Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Utara

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara mobile	83.200.000	28.040.000	-55.160.000
2	Bina Kependudukan	36.400.000	0	-36.400.000
3	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.961.976.253	7.959.474.875	-2.501.378
4	Penyediaan Formulir Input Pelayanan Administrasi Kependudukan	93.289.323	0	-93.289.323
5	Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan	9.905.119.050	8.362.470.448	-1.542.648.602
6	Pengelolaan dan Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil	117.307.740	0	-117.307.740
7	Penyajian Profil Perkembangan Penduduk Kota Administrasi Jakut	19.800.000	0	-19.800.000
8	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	353.465.464	238.802.364	-114.663.100
9	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	363.223.432	363.137.630	-85.802
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	106.368.526	0	-106.368.526
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	164.723.207	81.355.230	-83.367.977
12	Penyediaan sewa mesin fotokopi	262.231.200	181.843.200	-80.388.000
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	89.714.902	24.216.902	-65.498.000
14	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	146.076.318	90.582.506	-55.493.812
15	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.895.000	4.895.000	0

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
16	Pengadaan Sarana Kerja dan Prasarana Kantor	337.019.727	0	-337.019.727
17	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	345.911.397	345.684.408	-226.989
18	Penyediaan Perangkat Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	233.432.113	0	-233.432.113
19	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	477.771.052	477.704.332	-66.720
20	Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrikal dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	243.726.355	243.626.937	-99.418
21	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	76.759.200	57.027.600	-19.731.600
22	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus	6.812.000	6.812.000	0
23	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	176.823.266	0	-176.823.266
	<b>Total</b>	<b>21.606.045.525</b>	<b>18.465.673.432</b>	<b>-3.140.372.093</b>

Sudin Dukcapil Jakarta Utara mengalami jumlah refocusing anggaran di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.3.140.372.093,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing / pengurangan anggaran pada kegiatan dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing / efisiensi di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 2 (dua) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.11.707.000,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran: ada 13 (tiga belas) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.2.019.931.398,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 8 (delapan) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.1.120.440.695,-.

#### **d. Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat**

Tabel 3.5 Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Barat

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Mobile di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	182.000.000	56.680.000	-125.320.000
2	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan	10.868.541.515	10.865.902.472	-2.639.043
3	Bina Kependudukan (Biduk)	32.500.000	0	-32.500.000

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
4	Penyediaan Formulir Input Pelayanan Administrasi Kependudukan	144.888.645	0	-144.888.645
5	Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan	11.262.967.386	9.840.843.354	-1.422.124.032
6	Penyajian Profil Perkembangan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	46.100.000	0	-46.100.000
7	Pengelolaan dan Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil	112.616.570	0	-112.616.570
8	Penyajian Data Kependudukan Hasil Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	15.075.720	5.250.000	-9.825.720
9	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	326.622.360	326.622.360	0
10	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	3.685.000	1700000	-1.985.000
11	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	597.509.098	597.291.188	-217.910
12	Penyediaan Jasa dan Pengadaan perlengkapan Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	240.218.700	239.795.596	-423.104
13	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	420.287.839	418.503.243	-1.784.596
14	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	363.461.487	362.745.893	-715.594
15	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	249.386.610	91.880.580	-157.506.030
16	Penyediaan alat tulis kantor	189.145.044	157.177.900	-31.967.144
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.714.870	0	-53.714.870
18	Penyediaan sewa mesin fotokopi	374.616.000	259.776.000	-114.840.000
19	Penyediaan peralatan rumah tangga	18.276.720	0	-18.276.720
20	Penyediaan makanan dan minuman	78.112.160	12.284.000	-65.828.160
21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.335.800	4.350.000	-6.985.800
22	Pemeliharaan Alat Berat Mesin Pembangkit Listrik ( genset ) Kantor	59.326.316	30.477.100	-28.849.216
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	559.583.451	0	-559.583.451
24	Pengadaan Partisi Ruang Kerja	247.379.000	0	-247.379.000
25	Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor	123.142.217	0	-123.142.217
26	Penyediaan Penunjang Pindah Kantor	112.011.268	11.0637.500	-1.373.768
27	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	26.451.000	26.451.000	0
28	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	240.324.000	103.003.050	-137.320.950
29	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus	262.127.326	0	-262.127.326
	<b>Total</b>	<b>27.221.406.102</b>	<b>23.511.371.236</b>	<b>-3.710.034.866</b>

Sudin Dukcapil Jakarta Barat mengalami jumlah refocusing anggaran di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.3.710.034.866,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing/ pengurangan anggaran pada kegiatan dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD

DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing/ efisiensi di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 2 (dua) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.353.073.360,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran : ada 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.2.109.706.067,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 10 (sepuluh) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.1.600.328.799,-.

#### e. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan

Tabel 3.6 Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Selatan

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Mobile di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	145.600.000	43.525.000	-102.075.000
2	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	12.472.096.821	12.469.923.111	-2.173.710
3	Bina Kependudukan (Biduk) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	50.700.000	10.400.000	-40.300.000
4	Penyediaan Formulir Input Pelayanan Administrasi Kependudukan	133.236.455	0	-133.236.455
5	Penyusunan dan Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	42.200.000	0	-42.200.000
6	Pengelolaan dan Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Administrasi Jakarta Selatan	74.469.340	71.857.500	-2.611.840
7	Penyajian Data Kependudukan Hasil Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.848.560	0	-5.848.560
8	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	342.724.000	342.724.000	0
9	Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat/Caraka Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Selatan	723.878.218	716.533.818	-7.344.400
10	Pengadaan Sarana Kerja dan Prasarana Kantor Sudin Kependudukan dan Capil Jakarta Selatan	3.401.417.503	0	-3.401.417.503
11	Pengadaan Toner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.983.605.453	9.238.092.560	-1.745.512.893
12	Penyediaan alat tulis kantor	199.715.698	143.307.450	-56.408.248
13	Pengadaan Alat Pendingin untuk loket	96.779.760	95.772.600	-1.007.160

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
	pelayanan Admindukcapil Kecamatan, Kelurahan dan Sudin			
14	Penyediaan Jasa dan Pengadaan perlengkapan Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	237.271.306	237.265.579	-5.727
15	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	402.676.161	401.619.798	-1.056.363
16	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	359.995.292	357.436.010	-2.559.282
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	142.052.900	0	-142.052.900
18	Penyediaan makanan dan minuman	242.208.965	58.298.965	-183.910.000
19	Penyediaan sewa mesin fotokopi	449.539.200	316.448.000	-133.091.200
20	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.586.000	4.690.000	-2.896.000
21	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	2.010.000	0	-2.010.000
22	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	194.226.340	58.393.280	-135.833.060
23	Pemeliharaan Alat Berat Mesin Pembangkit Listrik ( genset ) Kantor	118.820.640	0	-118.820.640
24	Pemeliharaan Gedung Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	197.206.099	0	-197.206.099
25	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	77.872.400	63.000.000	-14.872.400
26	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	10.485.900	10.485.900	0
27	Pemeliharaan KDOL Roda 4 dan Roda 2 Sudin	158.339.148	0	-158.339.148
	<b>Total</b>	<b>31.272.562.159</b>	<b>24.639.773.571</b>	<b>-6.632.788.588</b>

Sudin Dukcapil Jakarta Selatan mengalami jumlah refocusing anggaran di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.6.632.788.588,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing/ pengurangan anggaran pada kegiatan dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing / efisiensi di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 2 (dua) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.353.209.900,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran: ada 16 (enam belas) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.2.431.657.283,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 9 (Sembilan) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.4.201.131.305,-.

## f. Sudin Dukcapil Jakarta Timur

Tabel 3.7 Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Jakarta Timur

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Pelayanan Mobile Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kota administrasi Jakarta Timur	79.199.000	12.675.000	-66.524.000
2	Bina Kependudukan (Biduk) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	35.500.000	0	-35.500.000
3	Penyajian Data Kependudukan Hasil Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	6.712.860	0	-6.712.860
4	Pengelolaan dan Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	68.140.600	0	-68.140.600
5	Penyajian Profil Perkembangan Penduduk di wilayah Kota/Kab Administrasi Jakarta Timur	12.546.600	12.675.000	128.400
6	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	243.282.000	314.282.000	71.000.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	218.076.430	162.349.000	-55.727.430
8	Penyediaan makanan dan minuman	125.702.320	8.702.320	-117.000.000
9	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	12.454.107.022	12.453.529.522	-577.500
10	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	427.121.231	426.826.409	-294.822
11	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	363.162.052	363.035.530	-126.522
12	Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat / caraka Kantor UKPD	718.199.502	718.137.858	-61.644
13	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	211.415.270	0	-211.415.270
14	Penyediaan sewa mesin fotokopi	412.077.600	311.731.200	-100.346.400
15	Penyediaan Jasa dan Pengadaan perlengkapan Mekanikal Elektrik Gedung kantor dan Supir Pelayanan Administrasi Dukcapil	229.603.388	238.138.488	8.535.100
16	Penyediaan Toner Pencetakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.728.756.012	11.198.627.307	-530.128.705
17	Penyediaan Formulir Input Pelayanan Administrasi Kependudukan	66.679.910	66.679.910	0
18	Penyediaan Barang Cetakan Umum Kantor UKPD	190.533.805	0	-190.533.805
19	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.660.400	1.303.600	-1.356.800
20	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	1.474.000	1.474.000	0
21	Pengadaan Sarana Kerja dan Prasarana Kantor Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	632.631.028	0	-632.631.028
22	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	311.207.160	174.000.000	-137.207.160

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
23	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	11.553.000	11.553.000	0
24	Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional	300.661.226	0	-300.661.226
	<b>Total</b>	<b>28.851.002.416</b>	<b>26.475.720.144</b>	<b>-2.375.282.272</b>

Sudin Dukcapil Jakarta Timur mengalami jumlah refocusing anggaran di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.2.375.282.272,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing / pengurangan anggaran pada kegiatan dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing / efisiensi di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 3 (tiga) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.79.706.910,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran: ada 14 (empat belas) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.929.625.839,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 7 (tujuh) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.1.445.594.789,-.

#### g. Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu

Tabel 3.8 Tabel Anggaran tahun 2020 Sudin Dukcapil Kep. 1000

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Mobile	3.185.000	0	-66.524.000
2	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	883.076.994	883.076.994	-35.500.000
3	Bina Kependudukan (Biduk)	33.562.993	0	-6.712.860
4	Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.150.460	199.150.460	-68.140.600
5	Penyediaan alat tulis kantor	7.754.945	3.514.500	128.400
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.490.534	0	71.000.000
7	Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	23.812.800	-55.727.430
8	Penyediaan makanan dan minuman	3.164.480	3.164.480	-117.000.000

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
9	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.647.200	300.000	-577.500
10	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	116.870.933	116.870.933	-294.822
11	Penyediaan Sarana Kegiatan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.923.000	1.975.000	-126.522
	<b>Total</b>	<b>1.323.288.139</b>	<b>1.231.865.167</b>	<b>-91.422.972</b>

Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu mengalami jumlah refocusing anggaran di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.91.422.972,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing/ pengurangan anggaran pada kegiatan dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing/ efisiensi di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 4 (empat) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.1.202.262.867,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran: ada 4 (empat) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.43.184.445,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 3 (tiga) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.48.238.527,-.

#### **h. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK)**

Tabel 3.9 Tabel Anggaran tahun 2020 UPTIK

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Sewa Jaringan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation dan SMS Masking	2.923.796.117	1.021.430.720	-1.902.365.397
2	Pemeliharaan Software dan Database Data Center	198.736.560	198.736.560	0
3	Pemeliharaan Komputer tingkat Kelurahan, Kecamatan, RSUD dan UPTIK	196.751.500	192.500.000	-4.251.500
4	Pemeliharaan Jaringan LAN Tingkat Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan	198.462.660	197.670.000	-792.660
5	Pemeliharaan Printer tingkat Kelurahan, Kecamatan, RSUD dan UPTIK	43.913.100	43.913.100	0

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
6	Pengadaan Perangkat Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	15.602.555.736	0	-15.602.555.736
7	Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	943.950.865	773.395.865	-170.555.000
8	Pengembangan Aplikasi Penunjang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	618.600.000	618.600.000	0
9	Monitoring Teknis Pelayanan Aplikasi SIAK DAN KTP-el	12.443.040	0	-12.443.040
10	Pemeliharaan Server Data Center	684.354.000	0	-684.354.000
11	Penyediaan Tenaga Teknis Layanan Teknologi Informasi Kependudukan	596.902.716	596.897.216	-5.500
12	Pemeliharaan Ruang Server	25.298.460	0	-25.298.460
13	Penyediaan Licensi Perangkat Lunak dan Anti Virus	8.180.475.600	6.437.457.400	-1.743.018.200
14	Penyediaan alat tulis kantor	206.037.106	0	-206.037.106
15	Penyediaan makanan dan minuman	119.872.000	9.297.000	-110.575.000
16	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.509.320	2.509.320	0
17	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.511.000	2.445.000	-66.000
18	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	3.806.500	3.806.500	0
19	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	31.450.000	31.450.000	0
20	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang KDO/KDO Khusus Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	18.356.349	18.356.349	0
	<b>Total</b>	<b>30.610.782.629</b>	<b>10.148.465.030</b>	<b>-20.462.317.599</b>

UPTIK mengalami jumlah refocusing anggaran yang cukup besar di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.20.462.317.599,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing / pengurangan anggaran pada kegiatan dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing / efisiensi pada UPTIK di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 7 (tujuh) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.917.371.829,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran: ada 8 (delapan) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.3.931.629.257,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 5 (lima) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.16.530.688.342,-.

## i. Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan (UPAK)

Tabel 3.10 Tabel Anggaran tahun 2020 UPAK

No	Nama Kegiatan	Sebelum Refocusing	Setelah Refocusing	Selisih
1	Penyajian Data Hasil Registrasi Lahir Mati Pindah Datang Penduduk WNI/WNA	373.794.590	362.838.330	-10.956.260
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	121.433.624	119.829.444	-1.604.180
3	Penyusunan Alur Bisnis Proses Pelayanan Adminduk	96.631.291	0	-96.631.291
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	136.710.761	0	-136.710.761
5	Penyediaan alat tulis kantor	24.684.770	8.228.000	-16.456.770
6	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	72.682.534	67.521.666	-5.160.868
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.124.000	2.040.000	-84.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	42.570.000	13.224.600	-29.345.400
9	Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	28.050.000	-9.411.600
10	Pengadaan peralatan kantor	85.431.161	64.951.260	-20.479.901
11	Pengadaan peralatan dapur kantor	34.286.606	0	-34.286.606
12	Pemeliharaan KDOL Roda 4 dan Roda 2	2.537.700	0	-2.537.700
13	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	10.944.600	3.000.000	-7.944.600
14	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	1.092.630	1.092.630	0
	<b>Total</b>	<b>1.042.385.867</b>	<b>670.775.930</b>	<b>-371.609.937</b>

UPAK mengalami jumlah refocusing anggaran di tahun 2020. Jika dilihat perbandingan antara anggaran tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing maka terlihat seperti tabel di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp.371.609.937,-. Selisih disebabkan karena adanya refocusing/ pengurangan anggaran pada (satu) dan bahkan terdapat beberapa kegiatan yang dihapuskan, menyusul APBD DKI Jakarta yang terkoreksi sebagai dampak pandemi covid-19. Rincian refocusing/ efisiensi di tahun anggaran 2020 :

- Kegiatan yang berjalan sesuai anggaran awal : ada 1 kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.1.092.630,-.
- Kegiatan yang dilakukan refocusing/ pengurangan jumlah anggaran : ada 9 (Sembilan) kegiatan dengan total nominal pengurangan anggaran Rp.101.443.579,-.
- Kegiatan yang dihapuskan : ada 4 (empat) kegiatan dengan total nilai anggaran Rp.270.166.358,-.

### 3. Penyerapan Anggaran Belanja tahun 2020

Tabel 3.11 Penyerapan Anggaran Disdukcapil Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
<b>1</b>	<b>DINAS DUKCAPIL</b>	<b>143.284.163.381</b>	<b>123.794.445.748</b>	<b>86,40%</b>
	<b>BTL (Belanja Tidak Langsung)</b>	<b>129.839.131.196</b>	<b>110.693.374.241</b>	<b>85,25%</b>
	<b>BL (Belanja Langsung)</b>	<b>13.445.032.185</b>	<b>13.101.071.507</b>	<b>97,44%</b>
2	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKPUS	17.351.040.757	15.628.929.235	90,07%
3	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKUT	18.465.673.432	18.209.808.191	98,61%
4	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKBAR	23.511.371.236	23.365.624.091	99,38%
5	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKSEL	24.639.773.571	24.468.957.259	99,31%
6	SUDIN DUKCAPIL KOTA - JAKTIM	26.463.045.144	24.617.580.856	93,03%
7	SUDIN DUKCAPIL KAB - KEP.SERIBU	1.231.865.167	1.163.263.214	94,43%
8	UPTIK	10.148.465.030	9.359.080.336	92,22%
9	UPAK	670.775.930	662.882.853	98,82%
	<b>TOTAL PENGABUNGAN</b>	<b>265.766.173.648</b>	<b>241.270.571.783</b>	<b>90,78%</b>

## B. Akuntabilitas Kinerja

Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan baik. Hal ini tercermin dari terlaksananya 3 Program yaitu:

- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ketiga program tersebut adalah upaya untuk mencapai **4 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja** sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Dukcapil sesuai ketentuan	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil
3	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memanfaatkan data penduduk
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Berikut adalah gambaran secara umum capaian kinerja sasaran strategis per indikator kinerja.

Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi s.d. 31 Desember 2020		Capaian s.d. 31 Desember 2020	
			Vol	Sat	Vol	Sat	Vol	Sat
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	75,70	%	85,96	%	113,55	%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Dukcapil sesuai ketentuan	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	86,00	Indeks	96,90	Indeks	112,67	%
3	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memanfaatkan data penduduk	60,00	%	98,33	%	163,89	%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	%	100,00	%	100,00	%

Dibawah ini adalah Analisis Kinerja dan Evaluasi yang merupakan gambaran capaian kinerja dan penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan yang mendukung sasaran strategis melalui indikator kinerja dimaksud.

### C. Analisis Kinerja dan Evaluasi

Evaluasi dan analisis kinerja sasaran strategis dilakukan melalui pemetaan hubungan antara tiap kegiatan yang berada didalam kelompok indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan pendukung, sehingga evaluasi dan analisis yang dilakukan lebih logis. Meskipun disadari bahwa pemisahan atau pengelompokan kegiatan berdasarkan indikator kinerjanya tidak dapat dilaksanakan secara hitam-putih, karena sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bisa saja memiliki dampak/manfaat pada indikator kinerja lainnya.

Selanjutnya, pembahasan evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dalam bagian ini akan didasarkan pada tiap indikator kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 atau dikenal dengan PERKIN 2020. Penetapan Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Jumlah keseluruhan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Anggaran Sasaran Strategis

No	Nama Program	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	50.819.196.318	50.119.623.674	98,62%
		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	34.732.383.795	32.634.450.443	93,96%
		Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data	169.727.025	167.224.500	98,53%
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan pelayanan kantor	49.574.729.351	47.197.450.690	95,20%
3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	631.005.963	458.448.235	72,65%
<b>Total</b>			<b>135.927.042.452</b>	<b>130.577.197.542</b>	<b>96,06%</b>

Adapun gambaran pencapaian target Perkin berdasarkan indikator kinerja dan persentase realisasi anggaran serta analisis kinerjanya adalah sebagai berikut.

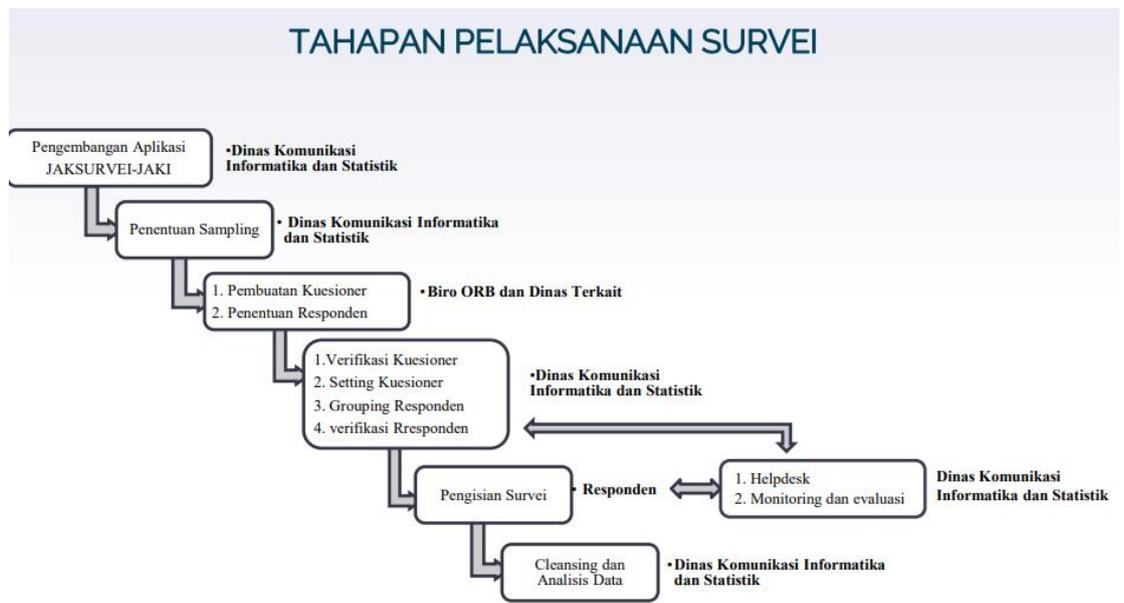
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Pemanfaatan Data Penduduk Instansi/ Lembaga Pengguna Data
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

# 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

## a. Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

Berikut adalah evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator kinerja *Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil*. Dalam rangka pencapaian Indikator diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan dukcapil yang dilakukan di loket-loket pelayanan dan instansi pengguna data base kependudukan. Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017.

Terdapat 6 tahapan dalam proses pelaksanaan survey yang dijabarkan melalui infogram di bawah ini :



Respon	Nilai		Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Sangat Puas	4	→ Lalu dirata-rata dan dikonversi menurut PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
Puas	3		2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
Tidak Puas	2		3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
Sangat Tidak Puas	1		3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Gambar 3.1 Perhitungan Interval Nilai Kepuasan

Untuk responden dibagi dalam 2 kategori yaitu internal dan eksternal (masyarakat). Responden eksternal yang berjumlah 10.880 responden masuk ke dalam survey mengenai layanan kelurahan (jenis layanan KK 48,10%, jenis layanan KIA 25,60%, dan jenis layanan Akta Kelahiran 26,30%). Sementara responden internal yang berjumlah 254 responden masuk ke dalam survey mengenai pegawai kelurahan, pegawai kecamatan dan pegawai suku dinas dengan pembagian sebanyak 49 orang melakukan survey ke suku dinas, 44 orang melakukan survey ke Kecamatan, dan 161 orang melakukan survey ke Kelurahan. Penjelasan tentang responden diperinci melalui tabel di bawah ini :

JUMLAH RESPONDEN									
Kategori	Jenis Responden	Periode	Responden	Target (Data Valid)	Target (Krejcie/Morgan)	Response Rate (Data Valid)	Response Rate (Krejcie-Morgan)	Tanggal Survei	Masa Survei
Eksternal	Layanan Kelurahan	TW 1	16.222	–	14.538	–	112%	02 Mar–13 Mar 2020	12 Hari
		TW 2	12.424	–	9.429	–	132%	02 Jun–15 Jun 2020	14 Hari
		TW 3	11.708	–	9.429	–	124%	24 Agus–7 Sep 2020	15 hari
		TW 4	10.880	–	9.429	–	115%	16 Nov–27 Nov 2020	12 Hari
Internal	Pegawai Kelurahan	TW 1	165	165	–	100%	–	02 Mar–13 Mar 2020	12 Hari
		TW 2	162	163	–	99%	–	02 Jun–15 Jun 2020	14 Hari
		TW 3	162	162	–	100%	–	24 Agus–7 Sep 2020	15 hari
		TW 4	161	161	–	100%	–	16 Nov–27 Nov 2020	12 Hari
	Pegawai Kecamatan	TW 1	39	42	–	93%	–	02 Mar–13 Mar 2020	12 Hari
		TW 2	41	41	–	100%	–	02 Jun–15 Jun 2020	14 Hari
		TW 3	42	42	–	100%	–	24 Agus–7 Sep 2020	15 hari
		TW 4	44	44	–	100%	–	16 Nov–27 Nov 2020	12 Hari
	Pegawai Suku Dinas	TW 1	33	34	–	97%	–	02 Mar–13 Mar 2020	12 Hari
		TW 2	32	32	–	100%	–	02 Jun–15 Jun 2020	14 Hari
		TW 3	45	45	–	100%	–	24 Agus–7 Sep 2020	15 hari
		TW 4	49	49	–	100%	–	16 Nov–27 Nov 2020	12 Hari

Gambar 3.2 Jumlah Responden IKM

Hasil Survey Layanan Dukcapil di tingkat Kelurahan :

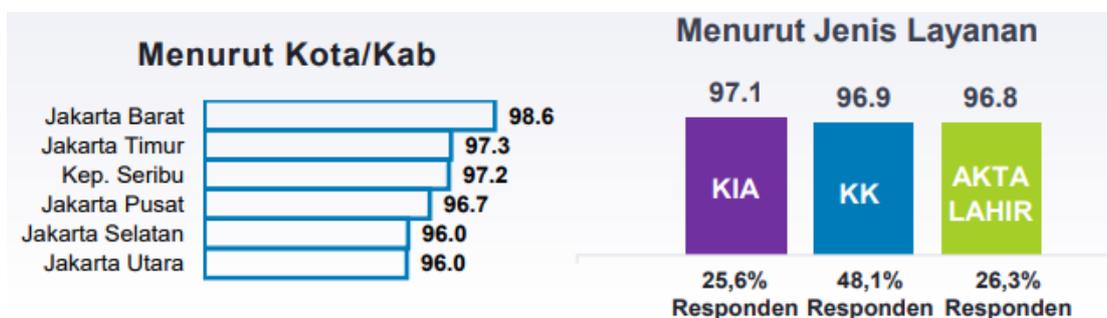
- Hasil survey ini mendapatkan penilaian indeks kepuasan **A dengan skor 96,6**
- Survey ini dinilai oleh masyarakat



Gambar 3.3 Nilai IKM Layanan Disdukcapil di Tingkat Kelurahan

Survey ini dinilai oleh masyarakat dan mendapatkan nilai mutu A yang berarti sangat puas. Dilihat dari tabel tersebut, nilai paling besar adalah 98,00 untuk variabel “biaya”, yang menandakan penerapan zero fee atau membebaskan segala bentuk biaya kepada warga sudah berjalan dengan baik dan masyarakat puas dan mengapresiasi kinerja Dukcapil melalui skor yang tinggi. Sedangkan nilai paling rendah dari tabel tersebut adalah variabel “sarana dan prasarana”, mengingat keterbatasan fasilitas prima di setiap Kelurahan seperti harapan masyarakat.

Layanan di tingkat Kelurahan :



- Penilaian menurut Kota/ kabupaten : nilai tertinggi diperoleh oleh Jakarta Barat dengan skor 98,6
- Jenis layanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah layanan penerbitan KK dengan skor 96,9

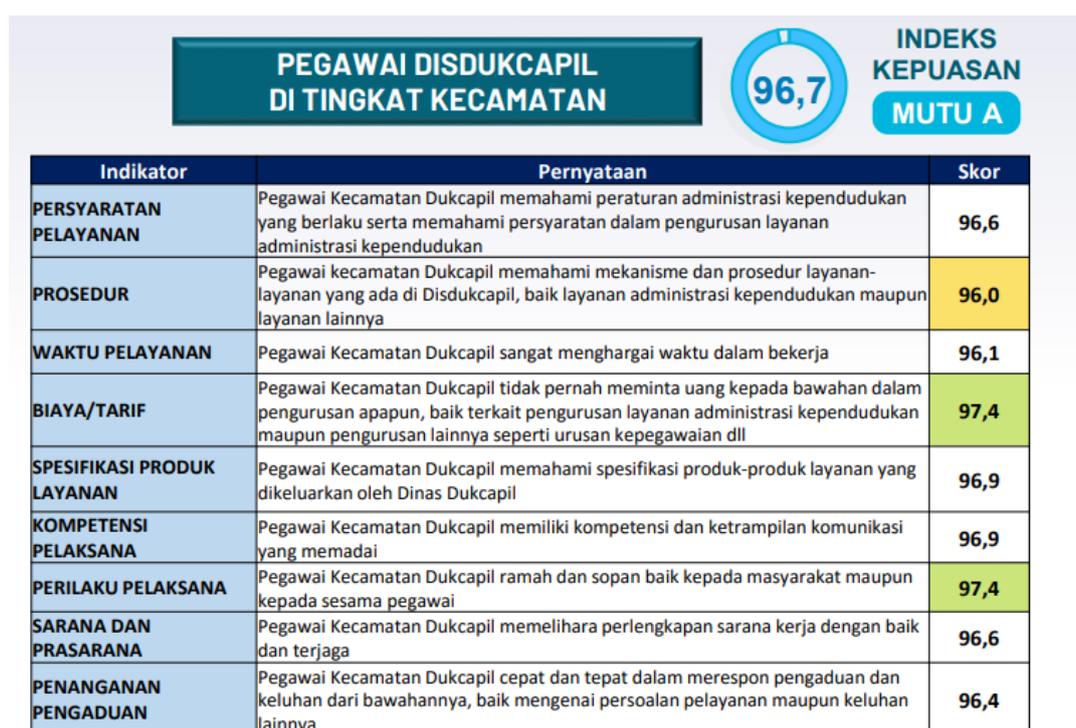
Hasil penilaian eksternal SKM di TW IV tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding nilai sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 3.14 Tabel Nilai Kepuasan Eksternal Disdukcapil DKI Jakarta

Periode	2018	2019	TW I Th 2020	TW II Th 2020	TW III Th 2020	TW IV Th 2020
Nilai SKM	82,54	84,29	96,00	96,10	96,80	96,90

Hasil Survey Pegawai Dukcapil di Tingkat Kecamatan :

- Survey dilakukan oleh pegawai Kelurahan
- **Hasil survey ini mendapatkan penilaian indeks kepuasan A dengan skor 96,7**



Gambar 3.4 Hasil Survey Pegawai Dukcapil Kecamatan DKI Jakarta

Hasil Survey Pegawai Dukcapil di Tingkat Suku Dinas :

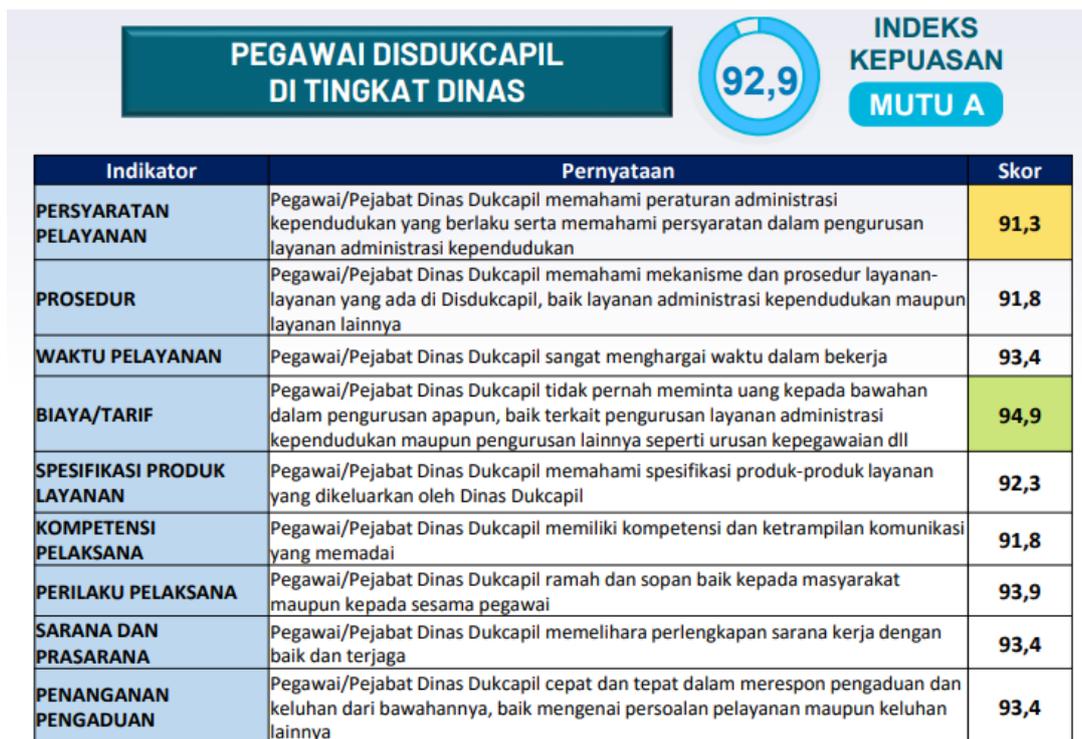
- Survey dilakukan oleh pegawai Kecamatan
- **Hasil survey ini mendapatkan penilaian indeks kepuasan A dengan skor 97,3**



Gambar 3.5 Hasil Survey Pegawai Suku Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

Hasil Survey Pegawai Dukcapil di Tingkat Dinas :

- Survey dilakukan oleh pegawai Suku Dinas
- Hasil survey ini mendapatkan penilaian indeks kepuasan A dengan skor 92,9



Gambar 3.6 Hasil Survey Pegawai Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta

Kesimpulan :

1. Tingkat kepuasan Disdukcapil baik di eksternal maupun internal tergolong sangat baik (nilai mutu A).
2. Layanan eksternal di tingkat kelurahan bernilai 96,9, naik 0,1 poin dari periode lalu. Sedangkan layanan internal bernilai 95,6 turun 1,3 poin dari periode lalu, dengan pembagian di tingkat kecamatan, suku dinas, dan dinas masing-masing 96,70; 97,30; 92,90.
3. Tidak ada perbedaan kepuasan yang signifikan antara layanan KK, KIA, dan Akta Kelahiran. Layanan KK menjadi yang paling banyak mencakup 48,1% populasi, KIA 25,6%, dan Akta Kelahiran 26,3%.
4. Terdapat 250 kelurahan dengan nilai mutu A (>88,31), 14 kelurahan dengan nilai mutu B (>76,61) dan 1 kelurahan dengan nilai mutu C, dan 2 kelurahan dengan nilai mutu D, yaitu kelurahan Kota Bambu Utara (Jakarta Barat) dan kelurahan Kebon Kelapa (Jakarta Pusat). Responden di kedua kelurahan tersebut salah persepsi penilaian, karena komentarnya baik dan identik. Terdapat banyak kelurahan dengan komentar/saran yang identik/mirip.

5. Walaupun pelayanan secara keseluruhan sudah sangat baik, ada beberapa masukan dan saran untuk pelayanan di kelurahan perihal parkir, antrian, ruang tunggu, dan sarana prasarana tambahan.

Pencapaian Indikator melalui pelaksanaan Program/ Kegiatan :

Tabel 3.15 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

NO	PROGRAM /INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	<i>Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil</i> Target : 86,00% Realisasi: 96,90%	112,67%	50.819.196.318 (Realisasi 98,62%)

Indikator Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil tersebut tercapai dengan dukungan dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.16 Kegiatan Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>					
1	Dinas Dukcapil	Penanganan Kasus Administrasi Kependudukan dan Penelusuran Permasalahan Administrasi Kependudukan	4.875.000	4875000	100,00%
		Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	101.027.330	100.620.000	99,60%
2	UPTIK	Sewa Jaringan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation dan SMS Masking	1.021.430.720	735.451.350	72,00%
3	Sudin Dukcapil Jak-Pus	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan	8.967.462.868	8.798.141.480	98,11%
		Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Mobile	16.575.000	16.575.000	100,00%
4	Sudin Dukcapil Jak-Ut	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.959.474.875	7.938.375.781	99,73%
		Pelayanan Administrasi Kependudukan secara mobile	28.040.000	28.040.000	100,00%
		Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan	8.362.470.448	8.272.548.020	98,92%
5	Sudin Dukcapil Jak-Bar	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan	10.865.902.472	10.813.038.834	99,51%

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
		Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Mobile di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	56.680.000	56.680.000	100,00%
6	Sudin Dukcapil Jak-Sel	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	12.469.923.111	12.391.879.205	99,37%
		Bina Kependudukan (Biduk) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	10.400.000	10.400.000	100,00%
		Pengelolaan dan Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Administrasi Jakarta Selatan	71.857.500	71.857.500	100,00%
7	Sudin Dukcapil Jak-Tim	-	-	-	-
8	Sudin Dukcapil Jak-Tim	Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	883.076.994	881.141.504	99,78%
Total			50.819.196.318	50.119.623.674	98,62%

Sebagai perbandingan berikut ini capaian IKM tahun 2017 s.d. 2020

No	Tahun	Target	Capaian	Keterangan
1	2017	-	62%	Didapatkan dari survey yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB pada Suku Dinas Dukcapil Kota Adm Jakarta Selatan, hasil ini dijadikan angka awal Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RPJMD 2017-2022
2	2018	65%	82,54%	-
3	2019	70%	84,29%	Tahun ini dilaksanakan survey sebanyak 2 kali dengan hasil : Tahap I : 84,61% Tahap II : 84,29%
4	2020	86%	96,90%	Tahun ini dilaksanakan survey setiap triwulan dengan hasil : Triwulan I : 96,00% Triwulan II : 96,10% Triwulan III : 96,80% Triwulan IV : 96,90%

**b. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Indikator ini merupakan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator keberhasilan dan tingkat capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.17 Capaian Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	<i>Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil</i> Target : 75,70% Realisasi: 85,96%	113,55%	34.732.383.795 (Realisasi 93,96%)

*Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil*, merupakan gabungan dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen KTP el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, KIA sampai dengan 31 Desember 2020 dengan capaian sebagai berikut:

- 1) Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP, KK dan KIA)

Tabel 3.18 Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

NAMA_KAB	KK			KTP EL			KIA			Rata-rata%
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	
JAKARTA BARAT	818.770	818.766	100,00%	1.863.597	1.863.190	99,98%	683.525	649.013	94,95%	87,56%
JAKARTA PUSAT	385.665	381.734	98,98%	851.825	848.774	99,64%	299.879	285.866	95,33%	87,84%
JAKARTA SELATAN	760.769	756.500	99,44%	1.728.686	1.726.372	99,87%	623.771	574.902	92,17%	86,58%
JAKARTA TIMUR	1.027.227	1.007.691	98,10%	2.324.800	2.321.326	99,85%	869.752	631.362	72,59%	83,49%
JAKARTA UTARA	600.468	596.093	99,27%	1.321.513	1.318.364	99,76%	504.552	450.917	89,37%	86,20%
KAB.ADM.KEP.SERIBU	8.402	8.350	99,38%	20.044	19.902	99,29%	9.057	9.031	99,71%	88,36%
<b>PROV. DKI JAKARTA</b>	<b>3.601.301</b>	<b>3.569.134</b>	<b>99,11%</b>	<b>8.110.465</b>	<b>8.097.928</b>	<b>99,85%</b>	<b>2.990.536</b>	<b>2.601.091</b>	<b>86,98%</b>	<b>85,94%</b>

2) Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kematian)

Tabel 3.19 Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

NAMA_KAB	AKTA KELAHIRAN			AKTA PERKAWINAN		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
JAKARTA BARAT	757.840	737.701	97,34%	1.279.762	719.001	56,18%
JAKARTA PUSAT	336.716	329.753	97,93%	533.376	351.522	65,91%
JAKARTA SELATAN	696.251	676.007	97,09%	1.137.206	660.717	58,10%
JAKARTA TIMUR	966.703	917.544	94,91%	1.566.834	962.266	61,41%
JAKARTA UTARA	557.345	534.240	95,85%	896.899	554.294	61,80%
KEP.SERIBU	10.128	10.113	99,85%	13.861	11.392	82,19%
<b>PROV. DKI JAKARTA</b>	<b>3.324.983</b>	<b>3.205.358</b>	<b>96,40%</b>	<b>5.427.938</b>	<b>3.259.192</b>	<b>60,04%</b>

NAMA_KAB	AKTA PERCERAIAN			AKTA KEMATIAN		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
JAKARTA BARAT	26.043	16.811	64,55%	15.587	15.574	99,92%
JAKARTA PUSAT	18.084	10.332	57,13%	9.592	9.587	99,95%
JAKARTA SELATAN	34.930	20.801	59,55%	15.027	15.009	99,88%
JAKARTA TIMUR	36.411	20.995	57,66%	21.681	21.653	99,87%
JAKARTA UTARA	22.502	12.913	57,39%	12.184	12.182	99,98%
KEP.SERIBU	336	128	38,10%	259	259	100,00%
<b>PROV. DKI JAKARTA</b>	<b>138.306</b>	<b>81.980</b>	<b>59,27%</b>	<b>74.330</b>	<b>74.264</b>	<b>99,91%</b>

Dari data di atas diperoleh rata-rata sebagai berikut :

No	Cakupan Kepemilikan Dokumen	Persentase
1	KTP el	99,85%
2	KK	99,11%
3	KIA	86,98%
4	Akta Kelahiran	96,40%
5	Akta Perkawinan	60,04%
6	Akta Perceraian	59,27%
7	Akta Kematian	99,91%
	<b>Rata-rata</b>	<b>85,96%</b>

Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Dukcapil tersebut tercapai dengan dukungan dari pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20 Kegiatan Pendukung Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Dukcapil

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>			
1	Dinas Dukcapil	Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)	2.233.000.000	2.142.250.000	95,94%
		Pengadaan Toner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.613.321.526	3.613.321.526	100,00%
		Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk	132.110.544	131.258.663	99,36%
		Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing	6.580.000	6.580.000	100,00%
		Perekaman Register Akta Berbasis T.I.	1.529.004.156	1.520.921.512	99,47%
		Penataan Arsip Register Akta Catatan Sipil	605.395.431	599.622.562	99,05%
2	UPTIK	Pemeliharaan Jaringan LAN Tingkat Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan	197.670.000	197.670.000	100,00%
		Pengembangan Aplikasi Penunjang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	618.600.000	612.000.000	98,93%
		Pemeliharaan Printer tingkat Kelurahan, Kecamatan, RSUD dan UPTIK	43.913.100	28.957.500	65,94%
		Penyediaan Licensi Perangkat Lunak dan Anti Virus	6.437.457.400	6.376.000.004	99,05%
		Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	773.395.865	399.219.004	51,62%
		Penyediaan Tenaga Teknis Layanan Teknologi Informasi Kependudukan	596.897.216	592.426.277	99,25%
		Pemeliharaan Software dan Database Data Center	198.736.560	179.685.000	90,41%
		Pemeliharaan Komputer tingkat Kelurahan, Kecamatan, RSUD dan UPTIK	192.500.000	192.500.000	100,00%
3	UPAK	Penyajian Data Hasil Registrasi Lahir Mati Pindah Datang Penduduk WNI/WNA	362.838.330	360.496.487	99,35%
		Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	119.829.444	118.977.554	99,29%
4	Sudin Dukcapil Jak-Pus	Penyediaan Toner Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.174.090.869	5.665.521.000	78,97%
5	Sudin Dukcapil Jak-Bar	Pengadaan Toner Pelayanan Administrasi Kependudukan	9.840.843.354	9.840.843.354	100,00%

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
6	Sudin Dukcapil Jak-Sel	Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Mobile di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	43.525.000	43.525.000	100,00%
7	Sudin Dukcapil Jak-Tim	Pelayanan Mobile Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kota administrasi Jakarta Timur	12.675.000	12.675.000	100,00%
<b>Total</b>			<b>34.732.383.795</b>	<b>32.634.450.443</b>	<b>93,96%</b>

### c. Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/lembaga pengguna data

Indikator ini merupakan Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan yaitu dengan menghitung pemanfaatan data penduduk (agregat, NIK, database dan KTP-el) oleh lembaga/ instansi pengguna data "Instansi pengguna data penduduk/Target instansi pengguna data selama 2018-2022 dengan target akhir masa RPJMD sebanyak 120 SKPD/ UPKD yang telah menggunakan data dari Dukcapil.

Pada tahun 2018 indikator ini belum masuk sebagai indikator Program Penataan Administrasi Kependudukan, akan tetapi peningkatan capaian indikator ini tetap dilakukan, adapun keberhasilan dan tingkat capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.21 Capaian pemanfaatan data penduduk instansi/lembaga pengguna data

NO	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	<i>Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/lembaga pengguna data</i> Target : 60,00% Realisasi : 98,33%	163,89%	169.727.025 (Realisasi 98,53%)

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beberapa SKPD/ UKPD/ Instansi Pengguna data diantaranya :

Tabel 3.22 Pemanfaatan Data Melalui Akses Data

No	Nama OPD	PKS	VERIFIKASI DATA	PERMINTAAN DATA	PEMADANAN DATA
1	Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional IV	V			
2	Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	V			
3	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	V		V	V
4	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	V		V	
5	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan	V			
6	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo	V			
7	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu	V			
8	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja	V			
9	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng	V			
10	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budhi Asih	V			
11	Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	V		V	
12	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	V			V
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	V			
14	RSIA Budi Kemuliaan	V			
15	RSUD Tanjung Priok	V			
16	RSUD Pulau Pramuka	V			
17	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Provinsi DKI Jakarta	V		V	V
18	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	V			V
19	RSUD Cempaka Putih	V			
20	RSUD Johar Baru	V			
21	RSUD Kemayoran	V			
22	RSUD Sawah Besar	V			
23	RSUD Tanah Abang	V			
24	RSUD Cilincing	V			
25	RSUD Pademangan	V			
26	RSUD Tugu Koja	V			
27	RSUD Kalideres	V			
28	RSUD Kembangan	V			
29	RSUD Taman Sari	V			
30	RSUD Jagakarsa	V			
31	RSUD Mampang Prapatan	V			
32	RSUD Pesanggrahan	V			
33	RSUD Tebet	V			
34	RSUD Kebayoran Baru	V			
35	RSUD Jati Padang	V			
36	RSUD Ciracas	V			

No	Nama OPD	PKS	VERIFIKASI DATA	PERMINTAAN DATA	PEMADANAN DATA
37	RSUD Kramat Jati	V			
38	RSUD Matraman	V			
39	RSUD Adhiyaksa	V			
40	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati	V			
41	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V			V
42	RS Ridwan Meuraksa	V			
43	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	V			
44	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	V			
45	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	V		V	V
46	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	V		V	
47	Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta	V		V	
48	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	V		V	V
49	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	V			
50	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta	V			
51	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	V			V
52	Dinas Perindustrian dan Energi	V			
53	Rumah Sakit Pelni	V			
54	Biro Administrasi Provinsi DKI Jakarta	V			
55	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	V			
56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	V			
57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI	V		V	
58	PT Bank QNB Indonesia, Tbk		V		
59	PT Cipta Karya Bumi Indah		V		
60	PT CRSGFI INDONESIA		V		
61	PT Integrity		V		
62	PT Koexim Mandiri Finance		V		
63	PT Veris		V		
64	Kedubes Taipei		V		
65	UPRS Jatirawasari		V		
66	Monasti Law Firm		V		
67	BTPN Bank		V		
68	Quraish hasyim		V		
69	Bank Harda Internasional		V		
70	Grand Steven B. Lumi		V		
71	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama		V		
72	PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia		V		
73	UPRS Muara Baru		V		
74	Notaris Erlina Kumala Sari		V		
75	Imigrasi Kelas II TPI Cilegon		V		

No	Nama OPD	PKS	VERIFIKASI DATA	PERMINTAAN DATA	PEMADANAN DATA
76	KPP Pratama Kebumen		V		
77	UPPPD Cilincing		V		
78	PT. Panin Sekuritas Tbk		V		
79	Agus Muchitawati		V		
80	Kanwil DJP Sumsel dan Babel		V		
81	BSM-Synergy Solutions Consulting & Investigation Services		V		
82	Dirjen Dukcapil Kemendagri		V	V	
83	Universitas Tarumanagara			V	
84	Kelurahan Pekayon			V	
85	Kelurahan Petamburan			V	
86	Kelurahan Slipi			V	
87	Universitas Indonesia			V	
88	Universitas Diponegoro			V	
89	Bawaslu Prov DKI Jakarta			V	
90	Biro Pemerintahan			V	
91	BPKP			V	
92	BPS Prov. DKI Jakarta			V	
93	Deputi Gub Bid Pengendalian Kependudukan			V	
94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			V	
95	Dinas Pemuda dan Olahraga			V	
96	Kecamatan Mampang Prapatan			V	
97	Kelurahan Cilangkap			V	
98	Kelurahan Gedong			V	
99	Kelurahan Halim Perdana Kusumah			V	
100	Kelurahan Kebayoran Lama Utara			V	
101	Kelurahan Kebon Bawang			V	
102	Lapor Covid-19 Majalah tempo			V	
103	Politeknik STIA LAN Jakarta			V	
104	PT UBC Medical Indonesia			V	
105	Puskesmas Kecamatan Penjarangan			V	
106	Puskesmas Kel. Marunda			V	
107	SIP Abdi Negara			V	
108	Unika Atma Jaya			V	
109	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta			V	
110	UPN Veteran Yogyakarta			V	
111	TGUPP			V	
112	Kesbangpol			V	
113	BPK			V	
114	Biro perekonomian			V	
115	Dinas Perhubungan				V
116	Bank DKI				V
117	Palang Merah Indonesia DKI Jakarta				V
118	Biro Dikmental				V

Indikator persentase pemanfaatan data penduduk Instansi/Lembaga pengguna data tersebut tercapai dengan dukungan dari pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.23 Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Pemanfaatan Data Penduduk

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>			
1	Dinas Dukcapil	Penyusunan/Penyajian Data Hasil Registrasi dan Profil Kependudukan	77.806.425	75.949.500	97,61%
		Peningkatan Pemahaman Pemanfaatan Data	86.670.600	86.025.000	99,26%
2	Sudin Dukcapil Jak-Bar	Penyajian Data Kependudukan Hasil Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	5.250.000	5.250.000	100,00%
<b>Total</b>			<b>169.727.025</b>	<b>167.224.500</b>	<b>98,53%</b>

## 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Indeks kepuasan pelayanan kantor

Indeks ini merupakan indikator berdasarkan realisasi penyerapan anggaran, dengan perhitungan realisasi anggaran :

<=25% : 1

>25% - 50% : 2

>50% - 75% : 3

>75% 100% : 4

Tabel 3.24 Capaian Indeks kepuasan pelayanan kantor

NO	PROGRAM /INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	<i>Indeks kepuasan pelayanan kantor</i> Target : 4 Indeks Realisasi: 4 Indeks	100%	47.197.450.690 (Realisasi 95,20%)

Indikator Indeks kepuasan pelayanan kantor tersebut tercapai dengan dukungan dari pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.25 Kegiatan Pendukung Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
		<b>Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Admindukcapil</b>			
1	Dinas Dukcapil	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.100.862.100	1.069.314.016	97,13%
		Penyediaan makanan dan minuman	62.727.900	55.286.400	88,14%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.675.000	3.675.000	100,00%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.462.000	3.372.000	97,40%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	1.362.083.916	1.337.546.329	98,20%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	960.968.308	945.385.080	98,38%
		Penyediaan alat tulis kantor	63.261.000	58.905.000	93,11%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	112.384.800	80.355.000	71,50%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	543.079.132	475.562.340	87,57%
		Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	120.806.320	117.330.154	97,12%
		Pemeliharaan Lift Kantor	249.000.000	212.073.400	85,17%
		Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	357.601.197	348.895.375	97,57%
		Pengolahan Limbah dan Instalasi	66.000.000	64.024.400	97,01%
2	UPTIK	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.509.320	1.925.000	76,71%
		Penyediaan makanan dan minuman	9.297.000	2.192.000	23,58%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.445.000	2.040.000	83,44%
3	UPAK	Pengadaan peralatan kantor	64.951.260	64.951.260	100,00%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.040.000	1.920.000	94,12%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	28.050.000	28.050.000	100,00%
		Penyediaan alat tulis kantor	8.228.000	8.118.000	98,66%
		Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	67.521.666	65.632.052	97,20%
		Penyediaan makanan dan minuman	13.224.600	11.497.000	86,94%
4	Sudin Dukcapil Jak-Pus	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.555.600	2.947.400	82,89%
		Penyediaan makanan dan minuman	22.328.308	16.312.000	73,06%
		Penyediaan jasa administrasi surat-menyurat / caraka dan sopir	711.960.258	704.172.971	98,91%
		Penyediaan alat tulis kantor	129.374.300	124.139.950	95,95%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	233.798.400	233.798.400	100,00%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	20.256.720	9.900.000	48,87%

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5	Sudin Dukcapil Jak-Ut	Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.355.230	77.203.500	94,90%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	363.137.630	359.655.261	99,04%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	345.684.408	344.507.174	99,66%
		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	238.802.364	149.034.056	62,41%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	181.843.200	181.843.200	100,00%
		Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat	477.704.332	476.482.861	99,74%
		Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrikal dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	243.626.937	240.450.388	98,70%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	24.216.902	19.365.450	79,97%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	90.582.506	55.821.000	61,62%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.895.000	3.651.100	74,59%
6	Sudin Dukcapil Jak-Bar	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	418.503.243	414.930.035	99,15%
		Penyediaan makanan dan minuman	12.284.000	10.030.500	81,65%
		Penyediaan Jasa dan Pengadaan perlengkapan Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	239.795.596	239.409.083	99,84%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	362.745.893	361.310.855	99,60%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.350.000	3.812.100	87,63%
		Pemeliharaan Alat Berat Mesin Pembangkit Listrik ( genset ) Kantor	30.477.100	30.391.300	99,72%
		Penyediaan Penunjang Pindah Kantor	110.637.500	110.637.500	100,00%
		Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	597.291.188	595.469.640	99,70%
		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	326.622.360	295.151.990	90,36%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	91.880.580	91.520.000	99,61%
		Penyediaan alat tulis kantor	157.177.900	157.177.900	100,00%
		Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	1.700.000	0	0,00%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	259.776.000	259.776.000	100,00%
7	Sudin Dukcapil Jak-Sel	Penyediaan Jasa dan Pengadaan perlengkapan Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	237.265.579	236.734.762	99,78%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	357.436.010	356.821.160	99,83%
		Pengadaan Toner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.238.092.560	9.238.092.560	100,00%
		Penyediaan alat tulis kantor	143.307.450	140.263.750	97,88%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	401.619.798	396.060.974	98,62%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	58.393.280	58.380.300	99,98%
		Penyediaan makanan dan minuman	58.298.965	57.037.300	97,84%

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	316.448.000	316.448.000	100,00%
		Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat/Caraka Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Selatan	716.533.818	708.289.185	98,85%
		Pengadaan Alat Pendingin untuk loket pelayanan Admindakapil Kecamatan, Kelurahan dan Sudin	95.772.600	95.772.600	100,00%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.690.000	3.035.400	64,72%
		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	342.724.000	272.499.363	79,51%
8	Sudin Dukcapil Jak-Tim	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	426.826.409	385.348.434	90,28%
		Penyediaan Jasa dan Pengadaan perlengkapan Mekanikal Elektrik Gedung kantor dan Supir Pelayanan Administrasi Dukcapil	238.138.488	233.733.000	98,15%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	311.731.200	285.753.600	91,67%
		Penyediaan makanan dan minuman	8.702.320	4.440.002	51,02%
		Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat / caraka Kantor UKPD	718.137.858	711.229.017	99,04%
		Penyediaan Toner Pencetakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.198.627.307	9.875.301.235	88,18%
		Penyediaan Formulir Input Pelayanan Administrasi Kependudukan	66.679.910	29.658.213	44,48%
		Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	363.035.530	349.847.553	96,37%
		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	314.282.000	187.566.706	59,68%
		Penyediaan Pekerja Kontrak Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	12.453.529.522	12.293.680.446	98,72%
		Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	1.474.000	1.210.000	82,09%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.303.600	1.200.000	92,05%
		Penyediaan alat tulis kantor	162.349.000	149.974.000	92,38%
9	Sudin Dukcapil Kep. Seribu	Penyediaan alat tulis kantor	3.514.500	3.492.500	99,37%
		Penyediaan sewa mesin fotokopi	23.812.800	23.794.540	99,92%
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	300.000	225.000	75,00%
		Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	116.870.933	111.510.670	95,41%
		Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.150.460	140.000.000	70,30%
		Penyediaan Sarana Kegiatan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.975.000	1.975.000	100,00%
		Penyediaan makanan dan minuman	3.164.480	1.124.000	35,52%
<b>Total</b>			<b>49.574.729.351</b>	<b>47.197.450.690</b>	<b>95,20%</b>

### 3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Indeks ini merupakan indikator berdasarkan realisasi penyerapan anggaran, dengan perhitungan realisasi anggaran :

<=25% : 1

>25% - 50% : 2

>50% - 75% : 3

>75% 100% : 4

Tabel 3.26 Capaian Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

NO	PROGRAM /INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	<i>Indeks kepuasan pelayanan kantor</i> Target : 3 Indeks Realisasi: 3 Indeks	100%	456.448.235 (Realisasi 72,65%)

Mengukur kegiatan yang terkait dengan pelayanan kendaraan operasional kantor dengan dukungan dari pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.27 Kegiatan Pendukung Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
		<b>Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Admindakapil</b>			
1	Dinas Dukcapil	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	9.329.500	7.923.250	84,93%
		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	40.000.000	40.000.000	100,00%
2	UPTIK	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	3.806.500	1.263.800	33,20%
		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	31.450.000	31.450.000	100,00%
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang KDO/KDO Khusus Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	18.356.349	6.300.401	34,32%
3	UPAK	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	1.092.630	240.500	22,01%
		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	3.000.000	3.000.000	100,00%

No	PD/UKPD	Program/ Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4	Sudin Dukcapil Jak-Pus	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	50.741.934	50.741.934	100,00%
		Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	20.896.500	6.679.100	31,96%
5	Sudin Dukcapil Jak-Ut	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO Khusus	6.812.000	5.802.800	85,18%
		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	57.027.600	57.027.600	100,00%
6	Sudin Dukcapil Jak-Bar	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	26.451.000	7.641.300	28,89%
		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	103.003.050	72.553.700	70,44%
7	Sudin Dukcapil Jak-Sel	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	10.485.900	8.866.200	84,55%
		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	63.000.000	62.994.000	99,99%
8	Sudin Dukcapil Jak-Tim	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	11.553.000	8.963.650	77,59%
		Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	174.000.000	87.000.000	50,00%
<b>Total</b>			<b>631.005.963</b>	<b>458.448.235</b>	<b>72,65%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian kinerja yang sesuai target, melebihi target ataupun dibawah target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan mulai dari penyusunan Renstra hingga penyusunan program, kegiatan dan anggaran setiap tahunnya serta tidak terlepas juga dari tanggung jawab seluruh pegawai, mulai dari pejabat eselon 3 selaku Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat eselon 4 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sampai dengan staf yang membantu pelaksanaan tugas yang telah diberikan Pimpinan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua pada tanggal 30 Januari 2020 telah ditetapkan 4 sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2020 yaitu:

- Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
- Meningkatnya kualitas pelayanan Dukcapil sesuai ketentuan
- Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi teknis yang melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan, telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ***dapat dikatakan “Berhasil” dalam pencapaian target capaian kinerja dan penyerapan anggaran.***

Dengan demikian, 4 sasaran strategis yang ditetapkan yang dicapai melalui 4 (empat) indikator kinerja juga ***tercapai.***

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban yang diberikan Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan, guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## B. Rekomendasi

Dengan adanya Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020, terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dilakukan rasionalisasi yang menyebabkan pengurangan terhadap anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Administrasi Kependudukan, secara tidak langsung mengakibatkan kualitas layanan, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Mengupayakan memaksimalkan pelayanan dengan sarana dan prasarana yang ada.
2. Pengembangan Aplikasi Pelayanan secara Daring/ Online (Alpukat Betawi, SI Loket, Dokter Perkasa dan SI Lapor Lagi).
3. Peningkatan anggaran pengadaan sarana dan prasarana akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.
4. Pemanfaatan media sosial untuk mensosialisasikan pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring/ Online.

Pada tahun-tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.